LKJ IP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintah Kabupaten Asahan



(0623) 41928

www.asahankab.go.id

Jl. Jendral Sudirman No.5 Kisaran

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Asahan Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Asahan.

Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Asahan Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 secara akuntabel untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Asahan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan pelaksanaan pembangunan tahun 2025 serta sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kisaran,

Bupati Asahan

Taufik Zainal Abidin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2025 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2025 agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan ini menginformasikan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025. Semua program yang dilaksanakan sudah mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari RPJMD 2025-2029. LKjIP ini disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Asahan yang dicapai dalam 12 sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2025 adalah 26 (dua puluh enam) indikator sasaran atau 73,07% masuk kategori atau 0sangat tinggi, 1 (Satu) indikator sasaran atau 3,8% masuk kategari tinggi, 3 (tiga) indikator atau 11,54% sasaran kategori sedang dan 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,54% belum ada realisasi dengan rincian sebagai berikut:

- Indikator dengan persentase capaian kinerja 100% atau lebih dan berkategori sangat tinggi berjumlah 13 (lima belas) indikator;
- Indikator dengan persentase capaian sesuai target berjumlah 2 (dua) indikator;
- Indikator dengan persentase capaian belum sesuai target berjumlah 8 (delapan) indikator;
- Indikator dengan belum mendapat capaian sesuai target 3 (tiga) indikator

Adapun hasil capaian Kinerja Pemerintah Kabupataen AsahanTahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam Tabel :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Reliasasi 2024	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	12,64	12,72	12,84	100,94	Dikjar
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,85	8,91	9,06	101,68	
2 Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	47,15	50,02	48,09	96,14	Disporapar
	Indeks Pembangunan	46,77	51	7,89	15,47	Dinas Perpustakaan dan

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Reliasasi 2024	2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	
	Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Literasi Masyarakat (IPLM)					Kearsipan
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0	35	Belum Rilis		Disporapar
		Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	0,24	0,25	Belum Rilis)		
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,65	73,90	73,93	100.04	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak anak	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	66,5	75,2	66,50	88.43	Dinas Pemberberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Indeks Pembangunan Gender	91,91%	91,91%	92,06	100,16	
		Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)	0,1760	0,1650	0,048	28,44%	
5.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	8,12	7,5-7	7,18	100 (Tercapai)	BPS, Dinas Sosial
		Tingkat Pengganguran Terbuka (%)	5,94	5,9-5,69	5,46	100 (Tercapai)	Dinas Ketenagakerjaan
6.	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	Indeks Ketahanan Pangan	69	70	70,66	100,94	Dinas Ketahanan Pangan
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	43,47%	44,27%	44,74	101,06% (angka sementara BPS)	BPS, Dinas Pertanian
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Insfrastruktur Daerah	0,68	0,69	0,73	105,79	Dinas PUPR
8.	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokrasi, Toleransi, dan Kegotongroyongan	Indeks kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78	78,3	78,50	100,25	Badan Kesbang Pol
		Indeks	56,05	58,30	58,33	105,05	Satpol PP

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Reliasasi 2024	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
di Masyarakat	Penyelenggaraan Trantibumlinmas					
9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Pelayanan Publik	3,17 (B-)	3,27 (B-)	4,28 (A-)	131	Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,84 (B)	87,09 (B)	87,89 (B)	100,90	Sekretariat Daerah
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,88	3,93	Belum Rilis		Sekretariat Daerah
	Indeks Pencegahan Korupsi	92,54	93	87,48	94.06	Inspektorat
	Indeks Desa	0,6807	0,6857	0,6883	100,38	Dinas PMD
10. Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi Muda Melek Teknologi.	Indeks Inovasi Daerah	45	48	54,71	113,97	Bapperida
	Indeks Pemerintahan Digital	2,88	2,88	2,86	99,31	Dinas Komimpo dan Informatika
11. Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	Penurunan Emisi GRK (CO2 Eq)	n.a	144.122 ,13	24780	17,19	Dinas Lingkungan Hidup
12. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,37	0,36	97.29	Badan Bencana Daerah

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu, kami sudah melakukan upaya antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang capaian kinerja dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Asahan untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan di masa mendatang.

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan, Sasaran , Indikator dan target Kinerja Pemkab. Asahan ……	17
Tabel	2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan	21
Tabel	2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024	31
Tabel	3.1	Pengkatagorian Capaian Kinerja ……	35
Tabel	3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan ……..	37
Tabel	3.3	Pengukuran capaian Sasaran 1 …….....	43
Tabel	3.4	Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) ……..	45
Tabel	3.5	Perbandingan Capaian Indikator Lama Sekolah (HLS)	47
Tabel	3.6	Capaian Indikator Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah	48
Tabel	3.7	Perbandingan Capaian Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah	51
Tabel	3.8	Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 ……	52
Tabel	3.9	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan	54
Tabel	3.10	Skor dan Status Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) Provinsi	57
Tabel	3.11	Pengukuran IPLM	58
Tabel	3.12	Nilai Hasil Pengukuran IPLN dan TKM Daerah terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga)	64
Tabel	3.13	Perbandingan tahun 2023 sampai 2025 capaian Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	66
Tabel	3.14	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Depelopment Indek	78
Tabel	3.15	Pengukuran Capaian Sasaran 3 dengan 1 indikator	81
Tabel	3.16	Perbandingan Pengukuran Capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH)	82

Tabel	3.17	Pengukuran Capaian Sasaran 4	84
Tabel	3.18	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	86
Tabel	3.19	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan (IPG)	89
Tabel	3.20	Pengukuran Capaian Sasaran 5	94
Tabel	3.21	Pengukuran Capaian Tingkat Kemiskinan	96
Tabel	3.22	Pengukuran Capaian Sasaran 6	99
Tabel	3.23	Capaian Indikator Kontribusi Sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	104
Tabel	3.24	Pengukuran Capaian Sasaran 7	105
Tabel	3.25	Capaian indikator Indeks Infrastruktur	106
Tabel	3.26	Pengukuran Capaian Sasaran 8	108
Tabel	3.27	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tranntibumlinmas sejak tahun 2023 s/d Tahun 2025	113
Tabel	3.28	Pengukuran Capaian Sasaran 9	115
Tabel	3.29	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik sejak Tahun 2023 s/d 25	117
Tabel	3.30	Berdasarkan Kemen PAN RB Nomor 3 Tahun 2025 Skor dan Satus Kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga	117
Tabel	3.31	Capaian Indikator Kinerja OIndeks Akses Keuangan Daerah	127
Tabel	3.32	Nilai IPKD MCSP Tahun 2025 Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota se-Sumatera Utara	128
Tabel	3.33	Capaian Indikator Pencegahan Korupsi	129
Tabel	3.34	Pengukuran Capaian Sasaran 10	135
Tabel	3.35	Capaian Indikator Kinerja AIndeks Inovasi Daerah sejak tahun 2023 s/d 2025	137
Tabel	3.36	Skor dan Status Kinerja Iddeks Inovasi Daerah terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota	139
Tabel	3.37	Pengukuran Capaian Sasaran 11	142
Tabel	3.38	Capaian Indikator Kinerja Penurunan Emisi GRK (GgCO2-e)	144
Tabel	3.39	Pengukuran Capaian Sasaran 12	146
Tabel	3.40	Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah	147
Tabel	3.41	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Gambaran Umum Kabupaten Asahan ……...	3
Gambar	1.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan ……	5
Gambar	2.1	Visi Pemerintah Kabupaten Asahan ……	15
Gambar	3.1	Rangkaian Kegiatan Target Pencapaian pengangguran terbuka tahun 2025	97
Gambar	3.2	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Ketahanan Pangan tahun 2025	100
Gambar	3.3	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indeks Infrastruktur tahun 2025	106
Gambar	3.4	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target , Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025	110
Gambar	3.5	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Trantibumlinmas	114
Gambar	3.6	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indeks Pencegahan Korupsi 2025	130
Gambar	3.7	Capaian Kinerja Indeks Desa	133
Gambar	3.8	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indeks Pemerintahan Digital 2025……	140
Gambar	3.9	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025	144
Gambar	3.10	Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025	146

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Asahan selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kepala Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP). Penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Asahan

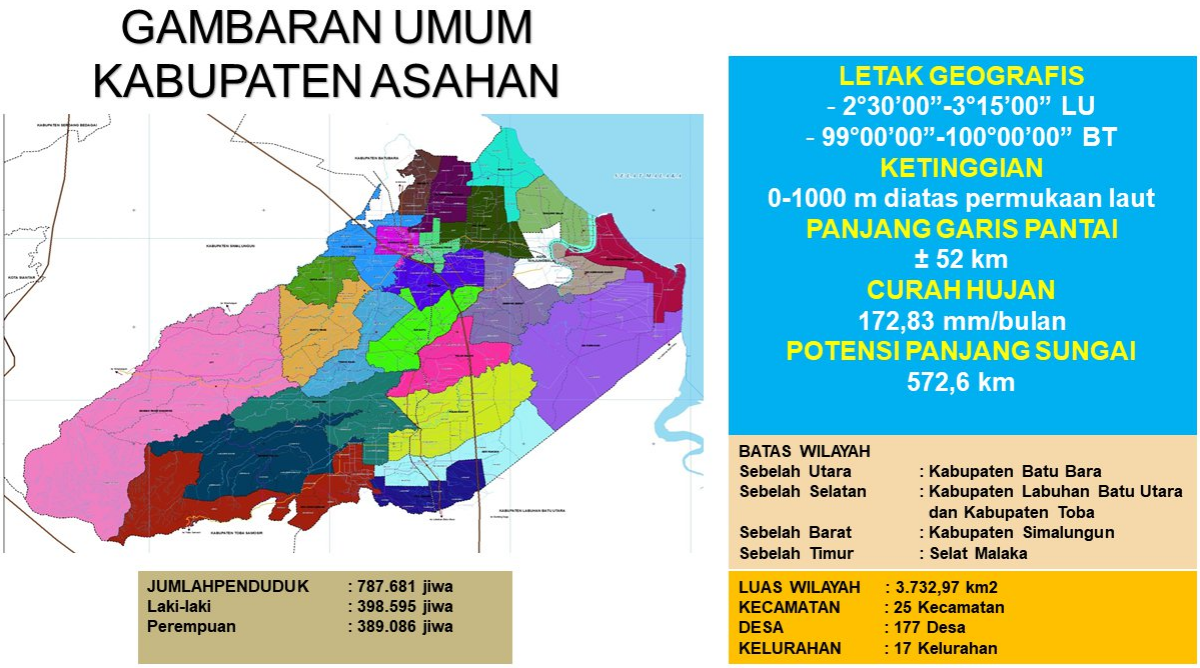
Kabupaten Asahan adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini beribukota di Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.732,97 km². Ibu kota terdahulu Kabupaten Asahan ialah Tanjung Balai, yang kemudian dimekarkan menjadi kota otonom.

Asahan merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang membentuk lembaga pengawas pelayanan umum bernama Ombudsman Daerah Asahan, melalui SK Bupati Asahan Nomor: 419-Huk/Tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004. Di era kolonial, wilayah ini disebut sebagai Assaban oleh orang Eropa. Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Asahan sebanyak 777.626 jiwa.

Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang di pegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan

Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada. Tanggal 15 Maret 1946, berlaku struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan dan wilayah Asahan di pimpin oleh Abdullah Eteng sebagai kepala wilayah dan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah.

Secara Geografis, Demografis dan lainnya, Gambaran Umum Kondisi Pemerintah Kabupaten Asahan tersaji dalam gambar berikut.



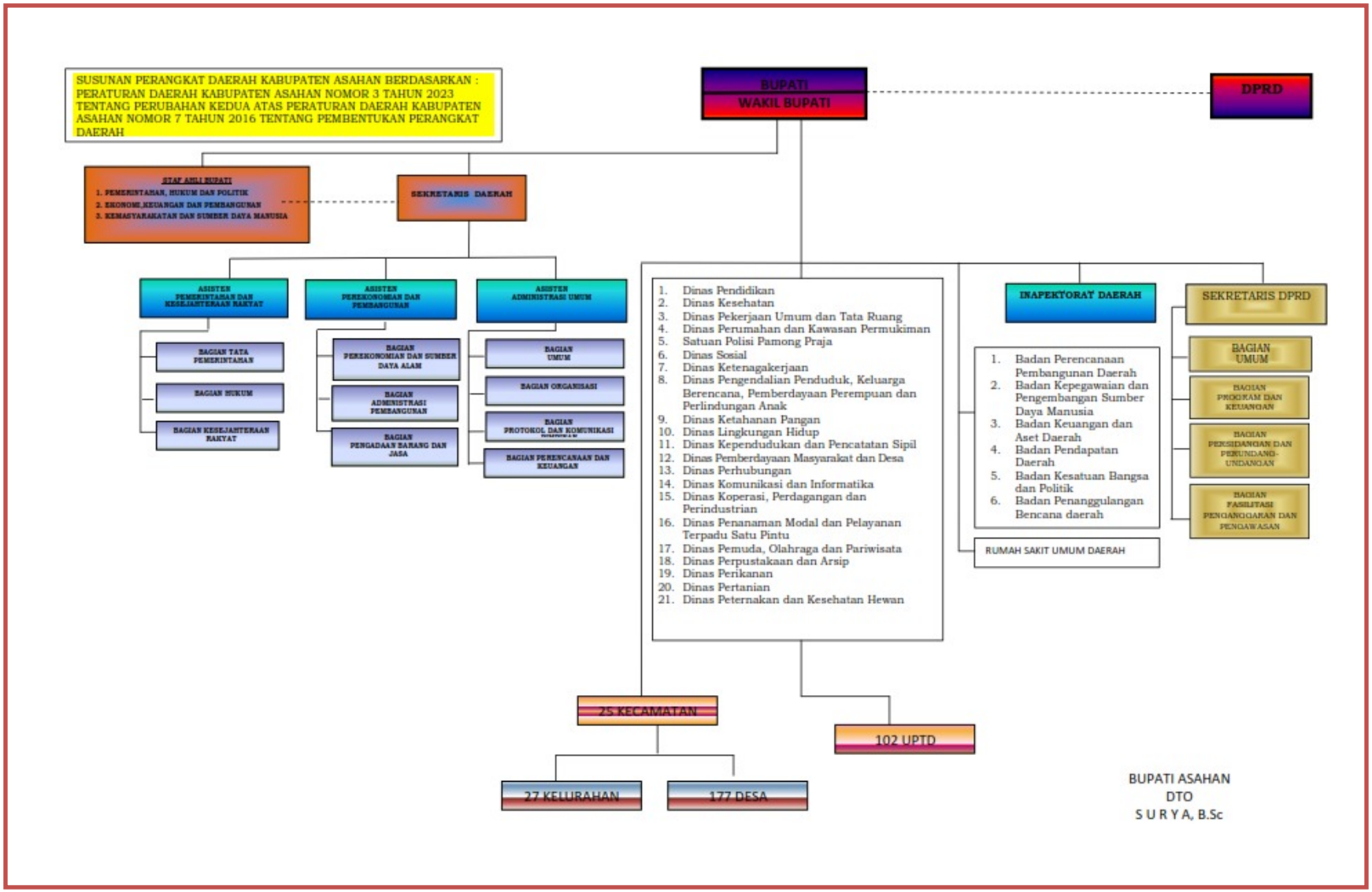
Gambar 1.1
Gambaran Umum Kabupaten Asahan

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kabupaten Asahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud *Kabupaten Asahan Yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelajutan*.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

Kepala Daerah sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas Kepala Kantor dan Camat. Berikut bagan struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Asahan. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asahan tergambar dalam struktur di bawah ini.



Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan

D. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Asahan

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Pemerintah Kabupaten Asahan yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Asahan periode 2025-2029 sebagai berikut :

Hasil analisa terhadap dokumen RPJM Daerah tersebut, terdapat 5 (lima) isu strategis Kabupaten Asahan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia, keluarga dan masyarakat inklusif, lebih maju dan merata;
2. Pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi/inklusif dan berkelanjutan dimotori oleh sektor perkebunan;
3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (lahan hutan dan pantai) yang aman, bermanfaat bagi semua pihak secara lestari;
4. Kesiapan penanganan mitigasi dan adaptasi bencana alam dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Terbatasnya kapasitas dan tata kelola kinerja pemerintah Daerah dan pelayanan publik, masyarakat partisipatif.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis utama Kabupaten Asahan Adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan

Data persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asahan menunjukkan tren penurunan yang positif pasca lonjakan signifikan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Asahan berhasil menekan angka kemiskinan dari 9,35% menjadi 8,12%, merefleksikan efektivitas program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Meskipun demikian, angka ini masih mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Asahan masih hidup di bawah garis kemiskinan, serta tantangan untuk mencapai target nasional percepatan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen masih menjadi prioritas. Oleh karena itu, percepatan penurunan kemiskinan tetap menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi terarah dan komprehensif dari pemerintah daerah. Ke depan, strategi percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Asahan harus berfokus pada pendekatan multidimensional yang menyasar akar permasalahan kemiskinan. Hal ini mencakup penguatan akses terhadap Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, peningkatan inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai seperti air bersih, sanitasi, dan listrik yang terjangkau. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga krusial untuk memastikan program-program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,sehingga mampu mendorong lebih banyak keluarga keluar dari garis kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Asahan..

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Terdapat berapa isu mengenai sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Salah satu permasalahan utama adalah kualitas pembangunan manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan gender. Hal ini berakibat pada kualitas SDM sebagai modal sosial utama daerah yang belumoptimal. Permasalahan kualitas SDM ini dapat menghambat proses Pembangunan daerah yang baik. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan sebagai isu strategis untuk dicegah dan ditangani guna mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik.

Di sisi lain, terdapat pemenuhan gizi yang masih belum optimal pada masyarakat sehingga menjadikan akar masalah pada isu strategis ini. Masih adanya kasus stunting yang disebabkan karena masih rendanya masyarakat terhadap keragaman pangan dan masih kurangnya terhadap keamanan pangan di Kabupaten Asahan. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian khusus bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Asahan.

3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

Infrastruktur Daerah yang memadai merupakan elemen penting untuk pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Asahan, terdapat beberapa masalah utama yang menjadi fokus pembangunan, seperti komunikasi dan elekomunikasi yang belum merat untuk meningkatkan literasi digital, penyediaan website yang memberikan informasi terkini dan aman dapat membantu meningkatkan minat baca masyarakat.Infrastruktur jalan di Asahan juga perlu ditingkatkan, terutama jalan lokal dipedesaan yang mengalami kerusakan berat. Ketidakmerataan Pembangunan disebabkan oleh kurangnya konektivitas antar wilayah. Selain itu, kesadaran berlalu lintas yang rendah juga menjadi masalah, ditandai dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas setiap tahun.

4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan masih menghadapi kendala struktural, seperti rendahnya daya saing sektor produktif, terbatasnya infrastruktur penunjang, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan serta perikanan.

Kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB masih terbatas, antara lain disebabkan oleh lemahnya hilirisasi industri, belum terbangunnya sistem logistik dan distribusi, serta rendahnya nilai tambah komoditas seperti kelapa sawit, karet, kakao,dan kelapa.

Sementara itu, ketimpangan ekonomi antarkawasan dan antarsektor masih menjadi tantangan yang berimplikasi pada kesenjangan pendapatan dan

keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Meskipun rasio gini menunjukkan tren penurunan, agenda pemerataan ekonomi tetap relevan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah perlu difokuskan pada penguatan sektor unggulan berbasis agroindustri, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, serta pengembangan infrastruktur konektivitas ekonomi dan sistem logistik yang mendukung perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu strategis yang bersifat lintas sektor dan jangka panjang karena berimplikasi langsung terhadap daya dukung ekosistem, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Kabupaten Asahan menghadapi tantangan ekologis yang kompleks, di antaranya deforestasi, pencemaran air dan tanah, penambangan tanpa izin, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta pengelolaan persampahan yang belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan degradasi lingkungan yang signifikan dan menurunkan kapasitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan ekologis.

Penurunan kualitas air sungai dan danau akibat limbah domestik dan industri, kerusakan hutan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, serta bencana banjir yang terjadi secara musiman menjadi indikator melemahnya system penyangga lingkungan. Di sisi lain, meningkatnya volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan, belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efisien, baik dalam aspek pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, maupun pemrosesan akhir.

Persoalan-persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan dan rendahnya efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.Kondisi ekologis yang memburuk memberi dampak terhadap produktivitas sektor pertanian, kesehatan masyarakat, ketahanan wilayah terhadap bencana,hingga menurunnya daya saing daerah, khususnya dalam menarik investasi dan

mengembangkan pariwisata berbasis alam. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Asahan perlu mengarahkan strategi pengelolaan lingkungan melalui penguatan instrumen tata ruang berwawasan lingkungan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan, penegakan hukum lingkungan yang konsisten, serta kolaborasi multipihak dalam konservasi sumber daya alam. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran publik, dan integrasi adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunandaerah yang inklusif, tangguh, dan berketahanan iklim.

6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi

Bidang tata kelola pemerintahan Daerah adalah salah satu aspek penting untuk mendukung pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis masalah yang telah diuraikan, ada beberapa isu utama yang perlu diprioritaskan penanganannya. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh keterbatasan sarana infrastruktur pengelolaan pemerintahan. Keterbatasan ini menghambat integrasi sistem informasi sehingga akses masyarakat terhadap informasi terbaru dan faktual belum terpenuhi. Masalah ini memengaruhi kinerja pemerintah Daerah dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga perlu menjadi prioritas penanganan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta inovasi dan pengembangan berkelanjutan

Selain masalah akuntabilitas kinerja pemerintah dan infrastruktur manajemen sistem informasi yang belum optimal, perwujudan kemandirian desa yang belum signifikan juga menjadi isu strategis. Masalah ini mencakup mekanisme perencanaan pembangunan yang belum kolaboratif dan kurangnya kapasitas sumber daya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik. Kekhawatiran ini dapat memengaruhi kualitas keputusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang holistik diharapkan dapat

menjadikan perangkat daerah Kabupaten Asahan sebagai penyelenggara pemerintahan yang didukung publik, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi program dan kegiatan.

Selain itu, kapasitas dan keahlian sumber daya manusia perlu diselaraskan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola yang inovatif dan adaptif.

7. Stabilitas Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memegang peran fundamental dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. Meskipun ketersediaan pangan relatif tercukupi, dinamika pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan fluktuasi sosial ekonomi menjadi faktor yang menuntut penguatan sstem pangan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek keterjangkauan, distribusi, dan pemanfaatan.16 Stabilitas ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kinerja infrastruktur pendukung seperti irigasi, pengelolaan lahan, logistik distribusi, dan efisiensi tata kelola. Sebagian besar lahan pertanian di Asahan masih bergantung pada curah hujan, sehingga revitalisasi sistem irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kesinambungan produksi pangan

Selain itu, diversifikasi pangan lokal perlu diperkuat guna mengurangi ketergantungan pada komoditas utama dan meningkatkan nilai gizi konsumsi masyarakat. Hal ini menuntut integrasi kebijakan dalam penyediaan sarana produksi, pengelolaan risiko pertanian akibat iklim ekstrem, dan peningkatan kapasitas petaniterhadap praktik pertanian berkelanjutan.

Penguatan sistem pangan daerah harus dibangun melalui sinergi lintas sektor, peningkatan efektivitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Asahan dapat mewujudkan system ketahanan pangan yang tangguh, adaptif terhadap perubahan, dan inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

8. Mitigasi Bencana dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Saat ini perubahan iklim merupakan salah satu isu yang dihadapi dunia. Adanya perubahan iklim yang memprihatinkan tentu akan memberikan dampak berupa bencana. Kabupaten Asahan memiliki potensi terhadap beberapa bencanaalam seperti banjir dan kebakaran. Hal tersebut tentu menjadikan pemerintah daerah

Kabupaten Asahan untuk memberikan pendampingan terhadap Masyarakat mengenai mitigasi bencana yang kemungkinan akan terjadi di Kabupaten Asahan. Ketenteraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas. Semakin tinggi tingkat kriminalitas, semakin tidak kondusif suatu Daerah. Tindak kriminalitas dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi, kemiskinan, krisis moneter, kurangnya lapangan kerja, dan penyalahgunaan narkoba.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis Pemkab, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Lima tahun terhitung sejak kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten dan RTRW.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas/ Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. VISI

Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga Pemda. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas, umumnya hanya satu kalimat atau tidak lebih dari satu paragraf.

Visi akan sangat berpengaruh ketika organisasi tersebut hendak melakukan perubahan. Visi membuat organisasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan apa yang pendiri cita-citakan, sehingga visi akan mencegah sebuah organisasi untuk membentuk arah baru atau melenceng dari tujuan visi.



Gambar 2.1 Visi Pemerintah Kabupaten Asahan

B. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan. “KABUPATEN ASAHAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”;
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama;
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 sebanyak 12 (dua belas) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Pemerintah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat,	1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	12,72	12,81	12,9	12,98	13,07
				Rata-Rata Lama Sekolah	8,91	8,97	9,03	9,03	9,15
		1.2	Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,02	52,89	55,76	58,63	61,5
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	51	54	58	63	68
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	35	37	39	41	43
				Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
		1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,90	74,10	74,30	74,50	74,70
		1.4	Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPKB)	75,2	80,7	84,1	86,3	87,7
				Indeks Pembangunan Gender	91,91%	91,91 %	91,92%	91,92%	91,93%
				Rasio Kekerasan Anak	0,1650	0,162 5	0,1600	0,1550	0,1525

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan yang Berkualitas	2.1	Meningkatnya daya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi Daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
		2.2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-7	6,75-6,25	6,0-5,5	75,25-4,75	4,5-4
				Tingkat Pengangguran Terbuka	5,9-5,69	5,8-5,56 -	5,71-5,43	5,61-5,29	5,51-5,16
		2.3	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70	70,66	71,33	72	72,67
				Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	44,27%	45,12 %	46,05%	47,07%	47,90%
		2.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73
3	Meningkatnya kehidupan masyaraka	3.1	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi,	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI))	N/A	6,3	6,4	6,5	6,6

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
	t yang harmonis		toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat						
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,3	78,5	78,6	78,9	79
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	58,3	61,3	63,83	66	70,5
4	erwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik yang profesional, efektif, inovatif, terintegritas dan akuntabel,	4.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Pelayanan Publik	3,27 (B-)	3,47 (B-)	3,51 (B)	3,55 (B)	3,60 (B)
				Indeks Kepuasan Masyarakat	87,09 (B)	87,34 (B)	87,59 (B)	) 87,84 (B)	88,09 (B
				Indeks Akses Keuangan Daerah	3,93	3.95	3,98	4	4,02
				Indeks Pencegahan Korupsi	93	94,5	95	95,5 9	96
				Indeks Desa	0,6857	0,6907	0,6957	0,7007	0,7057
		4.2	Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknolog	Indeks Inovasi Daerah	48	53	58	63	68
				Indeks Pemerintahan Digital	2,88	2,9	2,94	2,97	3,01
5	Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	5.1	Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	Penurunan Emisi GRK (GgCO2-e)	144.122,13	170.584,86	197.047,59	223.510,32	249.973,05

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
	yang berkelanjutan dan tangguh bencana		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45

Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Asahan periode 2025-2029

D. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah		Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang	HLS=APK/100	Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan
	Rata-Rata Lama Sekolah		Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas	RLS=Σ (Jumlah Penduduk pada jenjang jxLa ma sekolah jenjang j)/Total penduduk usia 25+	Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan
Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	nilai	IP merupakan instrumen komprehensif untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional maupun daerah. Ini mencerminkan sejauh mana	IPK= Σ=1(Wa + Ia)	Dinas Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga			kebijakan dan program kebudayaan telah berjalan secara efektif dan holistik dalam masyarakat Jendela Kemendikbud. Tujuan utamanya adalah menjadi dasar perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan pengukuran pencapaian dalam RPJMN 2020-2024		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan Perpustakaan Nasional RI untuk mengukur tingkat pembangunan literasi di masyarakat, terutama terkait peran perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat.	IPLM=7i=17Nilai UPLMi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	omain & Bobot Kesehatan dan Kesejahteraan - 20% Pendidikan dan Keterampilan - 20% Lapangan dan Kesempatan Kerja - 20% Partisipasi dan Kepemimpinan - 20% Dinas Pendidikan Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Gender dan Diskriminasi -20%	IPP=i=1[5(Nilai DomainixBoboti)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Dinsi & Bobot Ruang Terbuka untuk Olahraga (RTO) → 25% Sumber Daya Manusia Keolahragaan (SDM) → 25% Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga (PMO) → 25% Kebugaran Jasmani (KJ) → 25%		
	Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	Nilai	Dinsi & Bobot Ruang Terbuka untuk Olahraga (RTO) → 25% Sumber Daya Manusia Keolahragaan (SDM) → 25% Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga (PMO) → 25% Kebugaran Jasmani (KJ) → 25%	PO=RTO+SDM+PMO+KJ/4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		Lx = jumlah total tahun yang diharapkan akan dijalani oleh orang yang berusia x hingga sebelum usia berikutnya (dari tabel kehidupan). Lo = jumlah penduduk yang hidup pada umur 0 (lahir hidup). Hasil akhir dinyatakan dalam tahun.	UHH-ZLxLo	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai	IPBK adalah indeks komposit yang mencerminkan seberapa baik pembangunan di suatu wilayah mengintegrasikan aspek-aspek kependudukan-yakni dengan	IPBK=[(Indeks Partisipasi+Indeks Keberlanjutan+Indeks Penihakan+Indeks Integrasi+Indeks Kesetaraan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
serta Pemenuhan Hak Anak			menjadikan penduduk sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, serta memastikan pembangunan berlangsung berkelanjutan, inklusif, pro-rakyat, dan partisipatif		
	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	IPnelihat apakah laki-laki dan perempuan menikmati hasil pembangunan manusia yang setara, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nilainya biasanya dinyatakan dalam persentase (%). Jika IPG = 100%, berarti tidak ada kesenjangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia.	IPG= IPM Anak Peempиап IPM Anak Laki-Laki X 100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)		Jumlah Kasus Kekerasan Anak = total laporan atau kasus kekerasan terhadap anak dalam satu tahun (bisa dari data kepolisian, Dinas PPA, atau lembaga terkait). Jumlah Anak = jumlah penduduk berusia 0-17 tahun di wilayah tersebut. 10.000 = digunakan untuk menstandarkan angka agar dapat dibandinakan antarwilavah.		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya daya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	Persentase	Indikator ini menunjukkan seberapa besar peran atau sumbangan ekonomi suatu kabupaten terhadap total perekonomian provinsi. Nilai lebih besar berarti kabupaten tersebut memiliki kontribusi ekonomi yang relatif besar terhadap provinsi. Data bisa dihitung berdasarkan: Harga berlaku (ADHB) → untuk menggambarkan kontribusi nominal. Harga konstan (ADHK) → untuk menggambarkan kontribusi riil tanpa pengaruh inflasi.	Kontiribusi= PDRB Kabupaten x1d DRB Provinsix100%	Badan pusat Statistik
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persentase	Jumlah Penduduk Miskin penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (gabungan garis kemiskinan makanan + nonmakanan). Jumlah Penduduk → total populasi wilayah.	TK- Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Penduduk X 100%	
	Tingkat Pengganguran Terbuka (%	Persentase	Tirat Pengangguran Terbuka (T adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Menggambarkan kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja. TPT yang tinggi menandakan banyak tenaga kerja	TPT Jumlah penganggur X100%	Badan Pusat Statistik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			yang belum terserap, sedangkan rendah menunjukkan pasar kerja relatif baik. Data TPT di Indonesia dihitung BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dua kali setahun (Februari & Agustus).		
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	yj: IKP wilayah ke-j (kabupaten/kota/provinsi) ai: bobot indikator ke-i Xij: nilai indikator ke-i yang telah distandarisasi (menggunakan zscore atau metode "distance to scale" ke skala 0-100)	$y_j = \sum_{i=1}^{n} (a_i + X_{IJ})$	Dinas Ketahanan Pangan
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB		PDRB Sektor Pertanian mencakup sub-sektor: Tanaman pangan,Hortikultura, Perkebunan, Pet ernakan, Kehutanan,Perikanan Angka kontribusi ini menggambarkan peran relatif sektor pertanian terhadap ekonomi daerah. Jika angkanya menurun, belum tentu sektor pertanian berkurang secara nilai, tetapi bisa jadi sektor lain tumbuh lebih cepat. Data PDRB diperoleh dari BPS melalui publikasi PDRB	$KP(\%) = \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}}{\text{PDRB } Total} X100\%$	Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha.		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	NIndeks tinggi → Infrastruktur secara umum dalam kondisi baik dan memenuhi standar. Nilai rendah → perlu peningkatan di sektor tertentu seperti jalan, fasilitas pendidikan, atau kesehatan. Data ini bisa menjadi peta kebutuhan pembangunan dan basis evaluasi daerah.	$IFD = \sum_{i=1}^{n} (a_i + X_i)$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi, toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	Keterangan: Si= skor indikator ke-i (hasil survei, skala 1-5 atau 1-100) n = jumlah indikator Setiap dimensi diberi bobot yang sama atau proporsional sesuai metodologi Kemenag.	$IKUB = \frac{\sum_{i=1}^{n} s_i}{n}$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	Menilai kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Trantibumlinmas. Menjadi alat evaluasi capaian pemerintah, baik di pusat maupun daerah Panjin News Scribd Memicu perbaikan pelayanan, pemenuhan SPM, dan	$IPT = \sum_{i} (w_i + I_i)$	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			ketersediaan sumber daya di daerah		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Si= Nilai pada unsur ke-i (hasil pengukuran tiap unsur) n = Jumlah unsur yang dinilai (7 unsur utama) Kemudian hasil akhir dikonversi ke skala 0-100	$IPP=\frac{\sum_{i=1}^{n} S_i}{n}$	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.	IKM = Nilai Rata-rata totalx 25	Sekretariat Daerah
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	Ni = Nilai normalisasi indikator ke-i Wi = Bobot indikator ke-i	$IKAD = \frac{\sum(N_i \times N_i)}{\sum W_i}$	Inspektorat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	Indeks Pencegahan Korupsi	Nilai	Si = Skor indikator ke-i (hasil pengukuran, skala 0-100) Wi = Bobot indikator ke-i n = Jumlah indikator	$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{n}(S_i \times W_i)}{\sum_{1}^{n} W_i}$	
	Indeks Desa	Nilai	IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan	$INDEKS\ DESA=\frac{IKS+IKE+IKL}{3}$	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Jumlah Inovasi (berapa inovasi yang dihasilkan) Kategori dan Skor Inovasi (nilai berdasarkan kriteria inovasi) Bobot Inovasi (setiap kriteria diberi bobot sesuai ketentuan)	$IID=\frac{\Sigma(\text{Skor Inovasi}\times\text{Bobot})}{\text{Jumlah Bobot Maksimum}}\times 100$	Bapperida
	Indeks Pemerintahan Digital		Si= Skor indikator ke-i (biasanya 0-5 atau 0- 4 sesuai pedoman SPBE) Wi = Bobot indikator ke-i n = Jumlah indikator	$EGDI=\frac{\sum_{i=1}^{n}(S_i\times W_i)}{\sum_{1}^{n}W_i}$	Dinas Komimpo dan Informatika
Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	Penurunan Emisi GRK (CO2 Eq)		Emisi Baseline = jumlah emisi yang terjadi tanpa intervensi Emisi Aktual Mitigasi = jumlah emisi setelah upaya pengurangan dilakukan	PE=Emisi Baseline–Emisi Aktual Mitigasi	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah		Nilai Dimensi = rata-rata skor indikator dalam satu dimensi Bobot dimensi = bobot yang sudah ditentukan (umumnya sama atau sesuai pedoman	$=\frac{\Sigma(\text{Nilai Dimensi}\times\text{Bobot Dimensi})}{\text{Total Bobot}}\times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun (2025)

B. **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	12.72
			Harapan Lama Sekolah	8,91
2	2.1	Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50.02
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	51
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	36
			Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	0.25
3	3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun	73.90
4	4.1	Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	75.2
			Indeks Pembangunan Gender	91,91
			Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)	0,1650

5	5.1	Meningkatnya daaya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya da hilirisasi sektor ekonomi daerah.	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	5,03
6	6.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,5-7
			Tingkat Pengganguran Terbuka (%	5,9-5,69
7	7,1	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju swasembada Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70
			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	44,27
8	8.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	0,69
9	9.1	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokratisasi, toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,3
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	58,3
10	10.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Pelayanan Publik	3,27 (B-)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	87,09
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,93
			Indeks Pencegahan Korupsi	93
			Indeks Desa	0,6857
11	11.1	Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi	Indeks Inovasi Daerah	48
			Indeks Pemerintahan Digital	2.88

12	12.1	Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	Penurunan Emisi GRK (CO2 Eq)	144122,13
13	13.1	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	0,37

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah Pemerintah Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Perhitungan Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan target yang telah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

2. bila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2x\ \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/ Interpretasi	Rata-Rata (%) Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber Data : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Hasil Olahan : 2025)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Pemkab yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Asahan telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Reliasasi 2024	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	12,64	12,72	12,84	100,94	Dikjar
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,85	8,91	9,06	101,68	
2. Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Kebudayaan	47,15	50,02	48,09	96,14	Disporapar
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	46,77	51	7,89	15,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0	35	Belum Rilis		Disporapar
	Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	0,24	0,25	Belum Rilis)		
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,65	73,90	73,93	100.04	Dinas Kesehatan
4. Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak anak	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	66,5	75,2	66,50	88.43	Dinas Pemberberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Indeks Pembangunan Gender	91,91%	91,91%	92,06	100,16	
	Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)	0,1760	0,1650	0,048	28,44%	
5 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	8,12	7,5-7	7,18	100 (Tercapai)	BPS, Dinas Sosial
	Tingkat Pengganguran Terbuka (%)	5,94	5,9-5,69	5,46	100 (Tercapai)	Dinas Ketenagakerjaan
6. Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah menuju	Indeks Ketahanan Pangan	69	70	70,66	100,94	Dinas Ketahanan Pangan

	swasembada pangan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	43,47%	44,27%	44,74	101,06% (angka sementara BPS)	BPS, Dinas Pertanian
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Insfrastruktur Daerah	0,68	0,69	0,73	105,79	Dinas PUPR
8.	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokrasi, Toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat	Indeks kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78	78,3	78,50	100,25	Badan Kesbang Pol
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	56,05	58,30	58,33	105,05	Satpol PP
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Pelayanan Publik	3,17 (B-)	3,27 (B-)	4,28 (A-)	131	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,84 (B)	87,09 (B)	87,89 (B)	100,90	Sekretariat Daerah
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,88	3,93	Belum Rilis		Sekretariat Daerah
		Indeks Pencegahan Korupsi	92,54	93	87,48	94.06	Inspektorat
		Indeks Desa	0,6807	0,6857	0,6883	100,38	Dinas PMD
10.	Meningkatnya kualitas dan inovasi penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, data informasi, dan teknologi Muda Melek Teknologi.	Indeks Inovasi Daerah	45	48	54,71	113,97	Bapperida
		Indeks Pemerintahan Digital	2,88	2,88	2,86	99,31	Dinas Komimpo dan Informatika
11.	Meningkatnya pengelolaan kualitas air, udara dan lahan	Penurunan Emisi GRK (CO2 Eq)	n.a	1 44 .122 ,13	24780	17,19	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Meningkatnya	Indeks	0,35	0,37	0,36	97.29	Badan

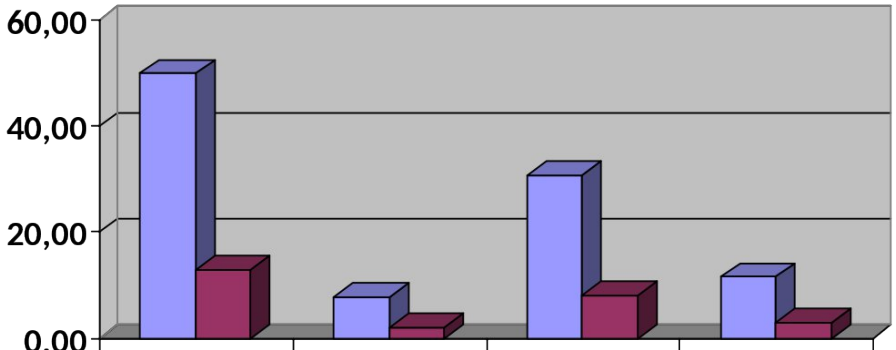
	ketangguhan terhadap bencana	Ketahanan Daerah				Bencana Daerah

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asahan Tahun 2025

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 5 Misi Bapak Bupati / Wakil Bupati Asahan tahun 2025 jika disimpulkan terhadap pencapaian dari target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 13 target;
2) Target dengan capaian realiasi 100% sebanyak 2 target
3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 8 target: dan
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 3 target.

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025



	Melampaui Target	Sesuai Target	Belum Mencapai	Tidak Dapat Di Peroleh
Persentase	50,00	7,70	30,77	11,53
Jumlah Indikator	13	2	8	3

Sumber Data : Hasil Olahan (2025)

Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kabupaten Asahan. Hal ini telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi pada saat tahun anggaran berjalan. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemkab Asahan Tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan ketentuan Kementerian dalam negeri resmi menerbitkan

peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Pemkab yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Asahan telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama.

MISI 1	**:**	**Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Asahan yang Cerdas, Sehat dan berkarakter.**
Sasaran	:	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah

Sasaran 1	:	**Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah**

Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah merupakan dua aspek perkembangan yang saling berkaitan dan sangat penting dalam membentuk kepribadian serta kesiapan anak menghadapi kehidupan sosial dan akademik.

- Intelektualitas mencakup kemampuan berpikir, bernalar, memecahkan masalah, memahami pelajaran, serta mengembangkan kreativitas dan daya kritis.
- Karakter meliputi nilai, sikap, dan perilaku seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, kerja sama, dan rasa hormat.

Pada usia sekolah, keduanya berkembang pesat dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Pendidikan yang baik tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak, dan berkepribadian positif.

Berikut alat ukur intelektualitas dan karakter anak usia sekolah yang umum digunakan, baik dalam konteks pendidikan maupun penelitian:

1. Alat Ukur Intelektualitas

Digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif anak, seperti kecerdasan umum, penalaran, dan pemecahan masalah.

- Tes Inteligensi (IQ)
    - WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children)
    - Stanford–Binet Intelligence Scale
    - Tes Kemampuan Akademik
    - Tes membaca, menulis, dan berhitung (literasi & numerasi)
    - Tes prestasi belajar sekolah
    - Tes Kemampuan Kognitif
    - Tes penalaran verbal dan nonverbal
    - Tes pemecahan masalah dan berpikir logis

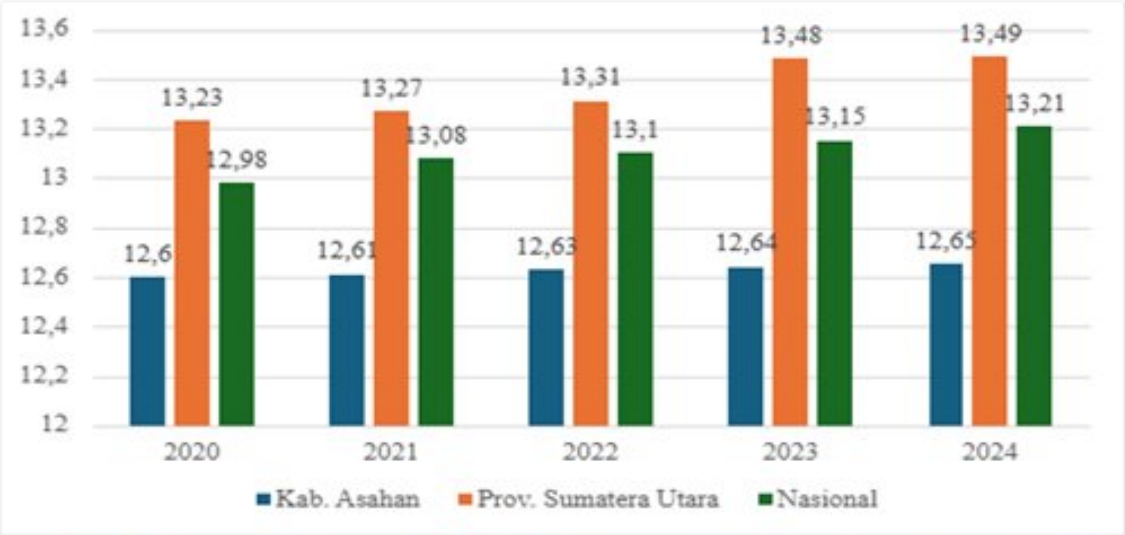
2. Alat Ukur Karakter Anak

Digunakan untuk menilai sikap, nilai, dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

- Observasi Perilaku
    - Lembar observasi guru/orang tua
    - Catatan anekdot (anecdotal record)
- Angket atau Skala Sikap
    - Skala Likert tentang kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, kerja sama
- Penilaian Autentik
    - Portofolio siswa
    - Jurnal refleksi
- Penilaian Teman Sebaya
    - Peer assessment terhadap sikap dan perilaku social

- Instrumen Pendidikan Karakter
    - Profil Pelajar Pancasila (gotong royong, beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global)

3. Alat Ukur Gabungan
    - Asesmen diagnostik (kognitif dan nonkognitif)
    - Asesmen formatif dan sumatif berbasis Kurikulum Merdeka



Gambar 2.27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Asahan, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asahan

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Harapan Lama Sekolah	12,72	12,84	100.94	Sangat Baik	13,16	97.56
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	8,91	9,06	102,02	Sangat Baik	9,21	98.37

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2025.

1. Indikator Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah perkiraan berapa tahun seorang anak (usia 7 tahun ke atas) diharapkan akan bersekolah di masa depan, menunjukkan potensi pencapaian pendidikan formal mereka dan kondisi sistem pendidikan suatu wilayah, berbeda dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengukur pengalaman pendidikan penduduk usia produktif. HLS mengukur kualitas infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan dari jenjang ke jenjang, dengan angka yang lebih tinggi berarti harapan pendidikan yang lebih panjang, setara jenjang diploma atau bahkan sarjana.

- Definisi: Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas.
- Fungsi: Indikator ini digunakan untuk mengukur peluang anak-anak untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang tertentu dan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pengetahuan.

Untuk Formulasi perhitungannya Adalah sebagai berikut :

Formulasi Harapan Lama Sekolah (HLS)

$$\mathbf{HLS} = \sum_{a=7}^{n} APS_a$$

Keterangan:

- APS_a = **Angka Partisipasi Sekolah** pada umur ke-a
- a = kelompok umur (dimulai dari **usia 7 tahun**)
- n = usia maksimum sekolah (umumnya **23–24 tahun**)

👉 Nilai APS_a dinyatakan dalam **proporsi** (bukan persen).

Contoh: APS 95% → **0,95**

Capaian Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) sampai dengan tahun 2025 terlihat dari tabel berikut:

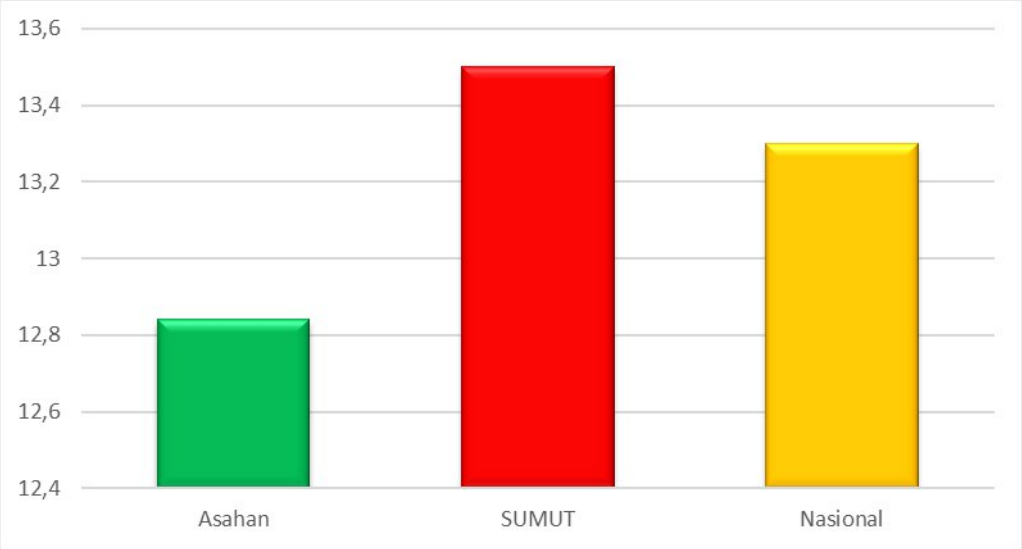
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)

2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
12,72	12,84	100,94

Sumber Data : BPS Kab. Asahan (2025)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 tercapai 12,84% sesuai target, kemudian apabila diukur dengan capaian kabupaten disampaikan juga sebagi perbandingan dengan Provinsi Sumatera Utara disampaikan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,07 persen di tahun 2025 yaitu sebesar 13,50% kemudian untuk capian persentase Harapan Lama Sekolah (HLS) nasional bisa dilihat capaian sebesar 13,30% hal ini dapat

disampaikan pada table dibawah :



Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Sumatera Utara memiliki tren meningkat sejalan dengan peningkatan IPM di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut IPM Kab. Asahan mengalami peningkatan pada tahun ini dengan nilai yang masih lebih rendah dari IPM tingkat nasional dan Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kab. Asahan relatif kurang baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Sebagai Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan juga di tingkat nasional, maka sudah selayaknya IPM Kab. Asahan berada di bawah level provinsi dan nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian* Harapan Lama Sekolah (HLS) *tersebut antara lain:

1. Tingkat ekonomi keluarga merupakan faktor krusial. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan membiayai kebutuhan sekolah (seragam, buku, transportasi) meskipun biaya pendidikan formal digratiskan. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat berpengaruh dalam menjaga keberlanjutan sekolah anak dari keluarga prasejahtera.
2. Kemudahan akses fisik menuju sekolah sangat menentukan. Pembangunan gedung sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, serta penyediaan transportasi sekolah yang aman di daerah terpencil dapat menekan angka putus sekolah.

Jarak yang terlalu jauh tanpa sarana transportasi yang memadai seringkali menjadi penghambat anak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Kualitas guru yang kompeten dan distribusi guru yang merata berperan dalam meningkatkan minat siswa untuk tetap bersekolah. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet memperkaya pengalaman belajar yang membuat siswa bertahan di sistem pendidikan.

Dalam rangka mencapai target Harapan Lama Sekolah (HLS) Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut:

1. Selain dari Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi biaya operasional sekolah dan buku pembelajaran peserta didik dan buku pegangan guru agar bebas biaya pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu serta Penyediaan perlengkapan sekolah gratis.
2. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Satuan Pendidikan terutama di daerah terpencil untuk mendapatkan ruang kelas yang layak sehingga kenyamanan dalam belajar mengajar sangat diutamakan untuk meningkatkan minat peserta didik dalam menyerap ilmu pengetahuan yang diterima.
3. Dalam upaya meningkatkan kualitas kompetensi pendidik/guru dalam mengajar pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan bimbingan teknis pembelajaran mendalam dengan mengundang pengajar-pengajar yang berkualitas serta membuat Teacher Learning Center (TLC) Pusat Pengajaran dan Pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan metode mengajar inovatif, pengembangan profesional, dan praktik pembelajaran bermakna untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi peserta didik.

Adapun perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2	3	4	5	6	7	8	8	9
			12,68	12,64	99,68	12,72	12,84	100.94

Sumber Data : Dinas Pendidikan (2025)

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2025 100,94% meningkat 1,26**%** dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian 99.68%

Selanjutnya untuk capaian Misi 1 dengan Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dapat dilihat dari data berikut:

2. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, mencerminkan kualitas pendidikan di suatu wilayah dan menjadi salah satu indikator penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini menunjukkan berapa lama rata-rata penduduk telah berada di sekolah, misalnya 9,2 tahun artinya setara lulus SMP, menandakan tingkat pendidikan masyarakat.

Fungsi dan Arti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) :

- Mengukur Kualitas Pendidikan: RLS tinggi menunjukkan penduduk rata-rata menempuh pendidikan lebih tinggi, sementara RLS rendah menandakan kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan.
- Komponen IPM: RLS yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan IPM suatu wilayah, karena pendidikan adalah salah satu pilar utamanya.
- Sasaran Usia: Perhitungan umumnya dilakukan untuk penduduk usia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan pada usia tersebut proses pendidikan formal sudah selesai.

Untuk Formulasi perhitungannya Adalah sebagai berikut :

Formulasi Umum RLS

$$\mathbf{RLS} = \frac{\sum(P_i \times T_i)}{\sum P_i}$$

Keterangan:

- P_i = jumlah penduduk usia ≥ 25 tahun pada jenjang pendidikan ke-i
- T_i = jumlah tahun sekolah yang ditamatkan pada jenjang pendidikan ke-i
- $\sum P_i$ = total penduduk usia ≥ 25 tahun

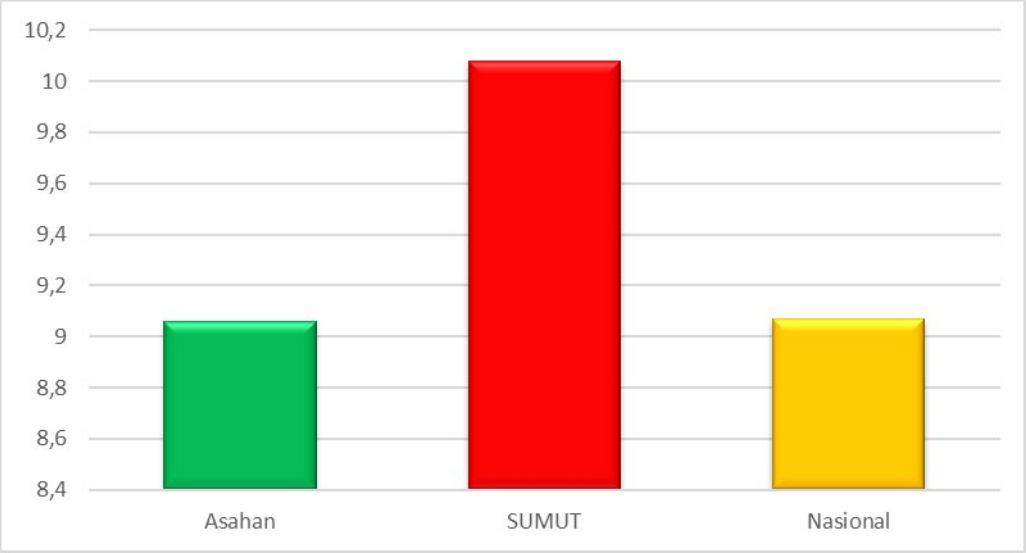
Capaian Kinerja Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sampai dengan tahun 2025 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
8,91	9,06	101,68

Sumber Data : Dinas Pendidikan (2025)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2025 tercapai 9,06% sesuai target, kemudian apabila diukur dengan capaian kabupaten disampaikan juga sebagi perbandingan dengan Provinsi Sumatera Utara disampaikan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 10,08% di tahun 2025 lebih tinggi dari capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) nasional sebesar 9,07% hal ini dapat disampaikan pada table dibawah



Pada tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Asahan tercatat sebesar 9,06 tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (9,07 tahun) dan masih tertinggal dari Provinsi Sumatera Utara (10,08 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan penduduk Kabupaten Asahan hampir setara dengan tingkat nasional, namun masih memerlukan peningkatan agar dapat menyamai rata-rata provinsi. Upaya penguatan akses dan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan PAUD dan Menengah, menjadi penting untuk meningkatkan RLS di Kabupaten Asahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian* Rata-rata Lama Sekolah (RLS) *tersebut antara lain:

1. Faktor Ekonomi Keluarga

   Pendapatan yang memadai memungkinkan orang tua membiayai pendidikan anak hingga jenjang tinggi, Stabilitas ekonomi mengurangi angka putus sekolah untuk membantu keluarga serta Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Anggaran pendidikan (APBD) yang memadai dan tepat sasaran untuk pembangunan sekolah, beasiswa, dan tunjangan guru Program wajib belajar 12 tahun yang didukung dengan kebijakan afirmatif (seperti Kartu Indonesia Pintar/KIP dan Pemerataan infrastruktur sekolah hingga ke daerah terpencil.

2. Akses dan Infrastruktur Pendidikan

   Ketersediaan sekolah (SD, SMP, SMA) yang merata dengan jarak terjangkau dengan fasilitas yang memadai (perpustakaan, laboratorium, internet) yang mendukung kualitas belajar dan transportasi yang terjangkau menuju sekolah serta kualitas dan Ketersediaan guru termasuk rasio guru-siswa yang ideal dan distribusi guru merata berkualitas termotivasi dengan sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan.

3. Kompetensi Pedagogik (Kemampuan Mengelola Pembelajaran)

   Metode Pembelajaran yang Inovatif Jika guru hanya menggunakan metode ceramah yang membosankan, minat siswa akan menurun. Guru yang mampu menciptakan suasana kelas yang interaktif membuat siswa merasa senang di sekolah serta Kemampuan Evaluasi Guru yang mampu memberikan penilaian yang adil dan membangun (bukan sekadar menghukum dengan nilai buruk) akan menjaga kepercayaan diri siswa untuk terus lanjut ke jenjang berikutnya.

Dalam rangka mencapai target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan bantuan biaya pendidikan mulai dari Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi biaya operasional sekolah dan buku pembelajaran peserta didik dan buku pegangan guru agar bebas biaya pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu serta Penyediaan perlengkapan sekolah gratis;
2. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Satuan Pendidikan terutama di daerah terpencil untuk mendapatkan ruang kelas yang layak sehingga kenyamanan dalam belajar mengajar sangat diutamakan untuk meningkatkan minat peserta didik dalam menyerap ilmu pengetahuan yang diterima;
3. Dalam upaya meningkatkan kualitas kompetensi pendidik/guru dalam mengajar pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan bimbingan teknis pembelajaran

mendalam dengan mengundang pengajar-pengajar yang berkualitas serta membuat Teacher Learning Center (TLC) Pusat Pengajaran dan Pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan metode mengajar inovatif, pengembangan profesional, dan praktik pembelajaran bermakna untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi peserta didik.

Adapun perbandingan Capaian Kinerja Rata-rata Lama Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandigan Capaian Indikator Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2	3	4	5	6	7	8	8	9
			8.87	88.85	99.77	8,91	9,06	101,68

Sumber Data : Dinas Pendidikan (2025)

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2025 101,68% meningkat 1.91% dari tahun 2024 sebesar 99.77%

Sasaran 2	:	Meningkatnya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Penguatan Budaya Prestasi Olahraga

Strategi ini secara komprehensif juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat melalui Asahan Cerdas dan Berkarakter. Menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mencapai kualita **Formulasi Umum RLS**

$$\mathbf{RLS} = \frac{\sum(P_i \times T_i)}{\sum P_i}$$

P **Keterangan:**

- P_i = jumlah penduduk usia ≥ 25 tahun pada jenjang pendidikan ke-i
- T_i = jumlah tahun sekolah yang ditamatkan pada jenjang pendidikan ke-i
- $\sum P_i$ = total penduduk usia ≥ 25 tahun

diperluas sampai dengan menyentuh sisi pengembangan jati diri masyarakat Kabupaten Asahan dengan mengedepankan penguatan budaya, bahasa, literasi, pendidikan karakter pemuda, dan prestasi olahraga yang nantinya dapat dilihat dari melalui keberhasilan dalam pembangunan kebudayaan, tingkat literasi masyarakat, serta keberhasilan dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga daerah. Implementasi optimalisasi pengembangan karakter, budaya, literasi dan prestasi olahraga masyarakat diarahkan pada penanaman nilai-nilai budaya dalam membentuk kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter, pengembangan minat baca masyarakat, peningkatan fasilitas dan pengembangan sarana prasara olahraga daerah seperti pembangunan kawasan sirkuit Kisaran dan lanjutan GOR.

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	**50,02**	48,09	96,14	Sangat Baik	61,5	78,19
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	51	7,89	15,47		73	10.80
3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	35	Belum Rilis			45	
4	Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	0,25	Belum Rilis			0,3	

Rendahnya capaian realisasi terhadap target indeks Pembangunan Litrasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2025 bukan di sebabkan oleh penurunan kualitas layanan literasi secara substansial melainkan disebabkan oleh Faktor Eksternal yaitu :

- Perubahan Metode Penghitungan: Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) melakukan perubahan fundamental terhadap metodologi penghitungan IPLM bulan Desember 2025.
- Ketidakselarasan Waktu : Perubahan metodologi tersebut terjadi setelah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta RPJMD selesai disusun dan disahkan. Hal ini menyebabkan target angka 51,00 (yang disusun menggunakan asumsi metodologi lama) menjadi tidak relevan lagi untuk dibandingkan secara apple-to-apple dengan realisasi skor 7,89 (yang dihasilkan dari metodologi baru).
- Bobot Variabel Baru: Dalam formulasi terbaru, variabel input (seperti jumlah perpustakaan dan buku) tidak lagi menjadi dominan, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan .

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2025.

3. ***Indikator*** *Indeks Pembangunan Kebudayaan*

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan kebudayaan di suatu wilayah (biasanya tingkat provinsi atau nasional) di Indonesia.

Secara sederhana, IPK berfungsi sebagai "rapor" yang menunjukkan sejauh mana kebudayaan tidak hanya dilestarikan, tetapi juga memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia.

Komponen Penyusun IPK

IPK tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah tari-tarian atau upacara adat, melainkan melalui 7 dimensi utama yang mencakup aspek luas dari kehidupan sosial-budaya:

1. Ekonomi Budaya: Mengukur keterlibatan masyarakat dalam industri kreatif dan kontribusi ekonomi dari sektor budaya.

2. Pendidikan: Melihat akses masyarakat terhadap pendidikan yang berbasis nilai-nilai budaya.

3. Ketahanan Sosial Budaya: Mengukur tingkat kerukunan, gotong royong, dan rasa aman dalam masyarakat.

4. Ekspresi Budaya: Melihat partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni, organisasi budaya, dan penggunaan bahasa daerah.

5. Literasi Budaya: Menilai tingkat minat baca, akses informasi, dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya.

6. Warisan Budaya: Fokus pada pelestarian benda cagar budaya, warisan budaya takbenda, dan situs sejarah.

7. Gender: Mengukur kesetaraan akses dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan kebudayaan.

Adapun Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8
N/A	N/A	N/A	N/A	47,15	-	**50,02**	48,09	96,14

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Asahan (2025)

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2023 tidak ada dan pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 sebanyak 0,94 poin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Daerah (Political Will)

   Ini adalah faktor paling krusial Keberhasilan biasanya terjadi jika pemerintah daerah menetapkan Alokasi Anggaran dengan Menyisihkan porsi APBD yang cukup untuk kegiatan kebudayaan, bukan sekadar untuk seremoni dan Regulasi yang Memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pemajuan kebudayaan dan perlindungan warisan local serta sinkronisasi program memastikan program bidang kebudayaan sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
2. Partisipasi dan Ekspresi Masyarakat

   Budaya akan mati tanpa pelaku. IPK akan tinggi jika Keterlibatan Masyarakat aktif dalam komunitas seni, upacara adat, dan organisasi budaya kemudian pelestarian bahasa untuk generasi muda masih menggunakan dan menghargai bahasa daerah sebagai identitas kemudian aksesibilitas tersedianya ruang publik (taman budaya, sanggar, museum) yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
3. Ketahanan Sosial dan Literasi

   Faktor ini sering menjadi titik lemah yang menyebabkan kegagalan dari Tingkat Literasi dikarenakan Rendahnya minat baca dan akses terhadap informasi budaya akan menurunkan skor dimensi literasi kemudian Konflik Sosial pada Wilayah dengan tingkat intoleransi atau konflik horizontal yang tinggi akan memiliki skor rendah pada dimensi Ketahanan Sosial Budaya dan Kesenjangan Gender Jika perempuan dibatasi dalam mengekspresikan karya atau mengambil peran dalam adat, dimensi gender akan anjlok.

Dalam rangka mencapai target Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Ekosistem Kebudayaan (Struktural) Upaya ini berfokus pada penyediaan wadah dan aturan main agar budaya tetap hidup kemudian revitalisasi ruang public untuk membangun dan mengaktifkan pusat kesenian, seperti museum gedung juang 45 dan replika bangunan sultan Asahan sebagai

pusat kreativitas warga, bukan sekadar gedung kosong kemudian implementasi dalam Menyusun dan menjalankan pokok pikiran kebudayaan daerah sebagai landasan kebijakan yang sesuai dengan karakter unik tiap wilayah dan yang paling Utama adalah digitalisasi warisan budaya dan cagar daerah melakukan pendataan dan pengarsipan digital terhadap cagar budaya dan warisan budaya takbenda agar mudah diakses oleh masyarakat;

2. Integrasi Budaya dalam Pendidikan (Dimensi Literasi & Pendidikan) Target persentase kebudayaan tidak akan tercapai jika generasi muda merasa asing dengan budayanya sendiri, Penguatan Muatan Lokal (Mulok) dalam Memasukkan seni, bahasa daerah, dan sejarah lokal ke dalam kurikulum sekolah secara aplikatif kemudian Program Seniman Masuk Sekolah Melibatkan praktisi budaya langsung dalam proses belajar mengajar untuk memberikan pengalaman praktis bagi siswa seperti guru Seni tari untuk pengembangan tradisi tari gubang kesenian asli dari Kabupaten Asahan serta Peningkatan Literasi Memperbanyak perpustakaan komunitas dan bahan bacaan bertema budaya lokal untuk meningkatkan skor dimensi literasi;
3. Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya (Dimensi Ekonomi) Budaya harus bisa memberi dampak ekonomi agar masyarakat bersemangat melestarikannya kemudian Inkubasi Produk Kreatif untuk Memberikan pelatihan desain, pengemasan (packaging), dan pemasaran bagi UMKM berbasis budaya seperti Batik Melayu Asahan atau kuliner tradisional dan Wisata Budaya Berkelanjutan Mengembangkan destinasi wisata yang mengedepankan pengalaman budaya otentik daripada sekadar wisata swafoto (selfie), sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.;
4. Penguatan Ketahanan Sosial & Kesetaraan (Dimensi Sosial) Kampanye Inklusi Budaya Memastikan bahwa kegiatan budaya melibatkan masyarakat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya (meningkatkan skor Dimensi Gender) serta Festival Lintas Budaya dalam Menyelenggarakan dialog antarbudaya untuk memperkuat toleransi dan gotong royong tersedia dalam komunitas budaya dari berbagai etnis yang terdapat di Kabupaten Asahan di Bawah Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala), yang merupakan indikator utama dalam Dimensi Ketahanan Sosial Budaya.

Tabel 3.10
Skor dan Status Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) Provinsi

No	Kode Kemdagri	Kode BPS	Provinsi	IPK
1	11	11	Aceh	55,33
2	12	12	Sumatera Utara	54,28
3	13	13	Sumatera Barat	59,34
4	14	14	Riau	58,99
5	15	15	Jambi	58,92
6	16	16	Sumatera Selatan	57,51
7	17	17	Bengkulu	61,45
8	18	18	Lampung	57,82
9	19	19	Kep. Bangka Belitung	57,99
10	21	21	Kepulauan Riau	59,8
11	31	31	D.K.I. Jakarta	55,96
12	32	32	Jawa Barat	55,5
13	33	33	Jawa Tengah	60,89
14	34	34	D.I. Yogyakarta	67,9
15	35	35	Jawa Timur	59,38
16	36	36	Banten	52,49
17	51	51	Bali	71,36
18	52	52	Nusa Tenggara Barat	57,37
19	53	53	Nusa Tenggara Timur	53,04
20	61	61	Kalimantan Barat	55,15
21	62	62	Kalimantan Tengah	60,89
22	63	63	Kalimantan Selatan	58,55
23	64	64	Kalimantan Timur	57,56
24	65	65	Kalimantan Utara	56,7
25	71	71	Sulawesi Utara	55,39
26	72	72	Sulawesi Tengah	51,42
27	73	73	Sulawesi Selatan	55,26
28	74	74	Sulawesi Tenggara	55,10
29	75	75	Gorontalo	52,48
30	76	76	Sulawesi Barat	50,47
31	81	81	Maluku	59,38
32	82	82	Maluku Utara	56,05
33	91	94	Papua	48,04
34	92	91	Papua Barat	48,52
			Indonesia	57,13

Dari data di atas terlihat bahwa Provinsi Sumatera Utara berada di urutan ke-2 dari 34 Provinsi se Indonesia dengan Skor Nilai 54,28

4 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

IPLM merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tahun 2025 menjadi tahun transisi penting bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan seiring dengan diperbaruinya parameter penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) oleh Perpustakaan Nasional RI yang baru di sosialisasikan pada akhir tahun anggaran 2025. Fokus laporan ini adalah memotret sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem literasi yang inklusif, adaftif terhadap teknologi digital, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Realisasi IPLM Kabupaten Asahan tahun 2025 secara administratif tercatat sebesar 7,89. Angka ini menunjukkan selisih yang cukup lebar jika disandingkan dengan target makro yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 51,00. Namun, perlu ditegaskan bahwa angka ini merupakan hasil penghitungan dengan instrumen baru yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) pada penghujung tahun 2025.

Tabel 3.11

Berikut Tabel Pengukuran IPLM :

Dimensi	Variabel	Indikator	Defenisi Operasional
Kepatuhan	Koleksi	Jumlah keseluruhan bahan perpustakaan dalam bentuk fisik yang dimiliki	Jumlah keseluruhan bahan pustaka dalam bentuk fisik yang dimiliki oleh perpustakaan.
		Jumlah keseluruhan bahan perpustakaan dalam bentuk digital	Jumlah keseluruhan bahan pustaka dalam format digital yang dimiliki dan

		yang dimiliki	diperoleh perpustakaan secara resmi (jual beli, hibah, hadiah, atau tukar menukar) serta dapat diakses oleh pemustaka
		jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah bahan pustaka cetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam koleksi yang digunakan oleh pemustaka dalam satu tahun terakhir.
		Jumlah akses atau penggunaan bahan perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah akses atau penggunaan bahan perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka, misalnya unduhan, kunjungan, atau pencarian dalam basis data elektronik dalam satu tahun terakhir
		Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir.
		Jumlah anggaran pengembangan bahan	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah

		perpustakaan bentuk fisik dan digital dalam 1(satu) tahun terakhir	daerah atau instansi terkait selama satu tahun anggaran untuk membeli, menambah, atau memperbarui koleksi bahan perpustakaan, baik berupa buku cetak maupun bahan digital (e-book, jurnal elektronik, dan sumber digital lainnya)
	Tenaga	Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma (D3) di bidang Ilmu Perpustakaan	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma (D3) di bidang Ilmu Perpustakaan
		Jumlah tenaga Perpustakaan yang memiiliki surat keputusan dari lembaga	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang memiiliki surat keputusan resmi dari lembaga/yayasan.
		Jumlah tenaga Perpustakaan yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), seperti pelatihan, seminar, lokakarya, sertifikasi, atau kegiatan sejenis yang mendukung kinerja perpustakaan yang

			dibuktikan dengan sertifikat yang mencantumkan jam pelatihan dalam kurun waktu satu tahun terakhir
		Jumlah Anggaran pengembangan keprofesian (diklat) tenaga perpustakaan dalam 1 tahun terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait selama satu tahun anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, workshop, atau program peningkatan kompetensi lainnya bagi pustakawan dan tenaga teknis
Kinerja	Pelayanan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan, baik luring maupun daring dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan, baik luring maupun daring dalam satu tahun terakhir
		Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di

		Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Perpustakaan dalam satu tahun terakhir, misalnya komputer, internet, perangkat lunak edukatif, audio book, atau akses ke basis data digital
	Penyelenggaraan dan Pengelolaan	Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam satu tahun terakhir, misalnya lokakarya (workshop) literasi, program membaca, seminar edukasi, kegiatan penjangkauan pemustaka diluar perpustakaan, atau kegiatan literasi digital
		Jumlah kerja sama yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah kerja sama formal atau informal yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal, seperti institusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, atau perusahaan, dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah berbagai	Jumlah berbagai

		jenis layanan yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital	jenis layanan yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital
		Jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan Perpustakaan	Jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan perpustakaan, misalnya layanan peminjaman, referensi, ruang baca, pocadi, perpustakaan keliling, elibrary, akses database online, katalog digital dan lain-lain
		Jumlah anggaran untuk peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan selama satu tahun terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam satu tahun anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan layanan perpustakaan, termasuk sarana prasarana, teknologi informasi, dan program layanan kepada masyarakat

Berikut pembobotan yang digunakan dalam penghitungan IPLM:

No.	Dimensi	Bobot
1	Kepatuhan	30%
2	Kinerja	70%

Rumus Penghitungan Indeks :

IPLM = ((0.30 × Dimensi Kepatuhan) +(0.70 × Dimensi Kinerja)) ×100

Tabel 3.12

Nilai hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025 Daerah terhadap 33 (Tiga Puluh Empat) **Kabupaten/Kota** berdasarkan Surat Perpustakaan Nasional RI Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025

NO	INSTANSI	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL SDM	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	ILPM
1	Kota Tebing Tinggi	0.062	0.087	0.324	0.679	0.075	0.502	26.84
2	Kota Sibolga	0.114	0.176	0.136	0.189	0.145	00.162	15.72
3	Kota Binjai	0.171	0.237	0.262	0.327	0.204	0.295	14.48
4	Kabupaten Latuhan Batu Selatan	0,159	0,164	0,127	0,222	0,162	0,174	13,85
5	Kabupaten Dairi	0.041	0.058	0.205	0.279	0.049	00.242	13.64
6	Kota Tanjung Balai	0.171	0.259	0.203 0	0.244	0.215	0.223	11.41
7	Kabupaten Toba	0.051	0.067	0.181	0.181	0.06	0.181	10.78
8	Kabupaten Labuhan Batu	0,127	0,179	0,107	0,224	0,152	0,188	10,05
9	Kabupaten Batu Bara	0,14	0,157	0,149	0,207	0,148	0,178	9,89
10	Kabupaten Deli Serdang	0.183	0.162	0.098	0.109	0.172	0.104	8.91
11	Kabupaten Langkat	0.138	0.168	0.127	0153	0.153	0.173	8.9
12	Kabupaten Pakpak Bharat	0.26	0.084	0.105	0.14	0.172	0.123	8.26
13	Kabupaten Asahan	0.037	0.084	0.088	0 0.085	0.06	0.087	7.89

14	Kabupaten Tapanuli Selatan	0.11	0.14 0	0.116	0.201	0.125	0.158	6.21
15	Kota Gunungsitoli	0.124	0.143	0.149	0.144	0.133	0.146	5.5
16	Kabupaten Mandailing Natal	0.028	0.079	0.059	0.107	00.054	0.083	4.75
17	Kabupaten Karo	0,045	0,029	0,026	0,038	0,037	0,031	3,32
18	Kabupaten Nias Barat	0.295	0.333	0.258	0.258	0.246	0.252	2.65
19	Kota Medan	0.04	0.027	0.022	0.027	0.034	0.025	2.64
20	Kabupaten Padang Lawas	0.293	0.335	0.238	0.353	0.314	0.296	1.64
21	Kabupaten Padang Lawas Utara	0.086	0.164	0.1	0.237	0.125	0.169	1.63
22	Kabupaten Nias	0.088	0.134	0.082	0.186	00.111	0.134	1.52
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	0.112	0.132	0.081	0.136	0.122	0.108	1.28
24	Kabupaten Nias Selatan	0.162	0.116	0.033	0.033	0.118	00.139	0.11
25	Kabupaten Tapanuli Utara	0.01	0.022	0.047	0	0.016 9	0.023	1.09
26	Kota Padang Sidempuan	0.151	0.268	0.127	0.209	0.21	0.168	0.43
27	Kabupaten Nias utara	0.109	0.202	0.085	0.117	0.156	0.101	0.15
28	Kabupaten Labuhan Batu Utara	0,038	0,12	0.062	0,128	0,079	0,094	0,01
29	Kabupaten Humbanghasundutan	0	0	0	0	0	0	0
30	Kabupaten Serdang Bedagai	0	0	0	0	0	0	0
31	Kota Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0	0
32	Kabupaten Samosir	0	0	0	0	0	0	0
33	Kabupaten Simalungun	0	0	0	0	0	0	0

Adapun Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan tahun 2023 samai 2025 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	25,37			46,77		51	7,89	15,47

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Asahan (2025)

Kinerja IPLM Kabupaten Asahan pada periode 2023-2024 menunjukkan tren peningkatan yang naik dan turun. Namun, pada tahun 2025, terjadi anomali statistik pada angka realisasi (7,89). Perlu ditekankan bahwa angka ini tidak menunjukkan penurunan kinerja riil. Secara output layanan, kinerja Pemerintah Kabupaten tetap menunjukkan tren positif. Hal ini dibuktikan dengan:

- Perluasan jangkauan perpustakaan keliling
- Peningkatan jumlah perpustakaan di Kantor Camat dan Rumah Ibadah
- Penambahan Koleksi Bahan Pustaka

Analisis faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

a. Analisis Keberhasilan (Peningkatan 2023 - 2024)

❖ Penyebab Keberhasilan:

- Keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Asahan dalam memperluas jangkauan Perpustakaan Keliling hingga ke kecamatan yang jauh dari pusat kota Kisaran.
- Adanya pembinaan perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Asahan yang sebelumnya belum terdata secara digital di aplikasi Perpusnas.

- Program TPBIS: Implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang mulai menyentuh pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga meningkatkan poin partisipasi masyarakat.

b. Analisis Penurunan Kinerja Administratif (Tahun 2025)

❖ Faktor Eksternal (Utama): Terhitung Desember 2025, standar penilaian IPLM berubah total. Untuk daerah luas seperti Asahan, metodologi baru ini memberikan tantangan besar pada variabel "Ketercukupan Tenaga Perpustakaan" dan "Pemerataan Layanan" yang kini dihitung dengan rasio penduduk yang lebih ketat.

❖ Faktor Internal:

- Target 51,00 merupakan target ambisius yang disusun pada awal periode RPJMD dengan asumsi perhitungan lama. Realisasi 7,89 mencerminkan potret riil berdasarkan "kacamata" baru pemerintah pusat terhadap kondisi literasi di daerah.
- Masih terbatasnya jumlah pejabat fungsional pustakawan di lingkup Pemkab Asahan yang tersertifikasi, di mana variabel ini memiliki bobot sangat tinggi dalam rumus IPLM terbaru.

c. Alternatif Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan

Berdasarkan kondisi di atas, berikut adalah langkah strategis yang diambil untuk mendukung visi Bupati Asahan:

- Penguatan Data : Mewajibkan seluruh perpustakaan yang tersebar di 25 kecamatan untuk memperbarui profil pada aplikasi pendataan Perpusnas.
- Inovasi Layanan : Meningkatkan aksebilitas perpustakaan digital
- Melakukan kerja sama formal atau informal dengan pihak eksternal, seperti institusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, atau perusahaan, dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan

Meskipun angka IPLM Kabupaten Asahan tahun 2025 sebesar 7,89 secara nominal berada di bawah target RPJMD, namun secara substansi pemerintah daerah

tetap menunjukkan komitmen kuat dalam membangun karakter masyarakat melalui literasi. Capaian ini merupakan titik awal (new baseline) yang akan dijadikan acuan dalam melakukan akselerasi program di tahun mendatang agar selaras dengan standar nasional terbaru.

5 Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan dan kesejahteraan pemuda di suatu wilayah. Di Indonesia, IPP disusun oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tujuan IPP adalah :

- Menilai kualitas hidup dan kapasitas pemuda.
- Menjadi dasar perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan kepemudaan.
- Membandingkan capaian pembangunan pemuda antarwilayah dan antarwaktu.

Kelompok Usia :

- Umumnya mencakup pemuda usia 16–30 tahun (sesuai Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan).

Dimensi Utama IPP

IPP dihitung dari beberapa dimensi (masing-masing diwakili oleh sejumlah indikator), antara lain:

1. Pendidikan – angka partisipasi kasar (APK) : SMA/SMK , Angka pertisipasi kasar perguruan tinggi, Rata-rata lama sekolah.
2. Kesehatan dan Kesejahteraan – pesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, persentase remaja perempuan yang sedang hamil.

3. Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja – pemuda wirausaha, tingkat pengangguran terbuka pemuda.
4. Partisipasi dan Kepemimpinan – persentase pemuda yang mengikuti sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi,persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat.
5. Gender dan Diskriminasi – angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan usia 16- 24 tahun yang sedang menempuh tingkat pendidikan SMA keatas, persentase pemuda perempuan yang bekerja disektor formal.

Skala dan Interpretasi

- Nilai IPP biasanya 0–100.
- Semakin tinggi nilai, semakin baik kondisi pembangunan pemuda di wilayah tersebut.

Manfaat Praktis

- Mengidentifikasi kesenjangan (misalnya pendidikan vs ketenagakerjaan).
- Menentukan prioritas program (pelatihan kerja, kesehatan mental, partisipasi sosial).
- Memantau dampak kebijakan dari waktu ke waktu.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan telah menetapkan target capaian kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Asahan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2030. Adapun target yang dimaksud adalah sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat	Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	NA	35	37	39	41	43	45

Ringkasan Target IPP Sumatera Utara

Tahun	Target IPP (Sumut)	Catatan
2024	~57,37	Target internal Dispora untuk Sumut
2025	> Nasional 63	Target nasional IPA 63 (acuan provinsi)
2026	67,24	Target nasional jangka menengah (acuan)
2027	menuju ~70	Target nasional jangka menengah (acuan)

Ringkasan target IPP Nasional :

Tahun	Target IPP
2024	57,67
2025	63 (Kemenpora)
2026	67,24
2027	70 (Kemenpora target jangka menengah)
2029	72,53 (per rencana stratejik)

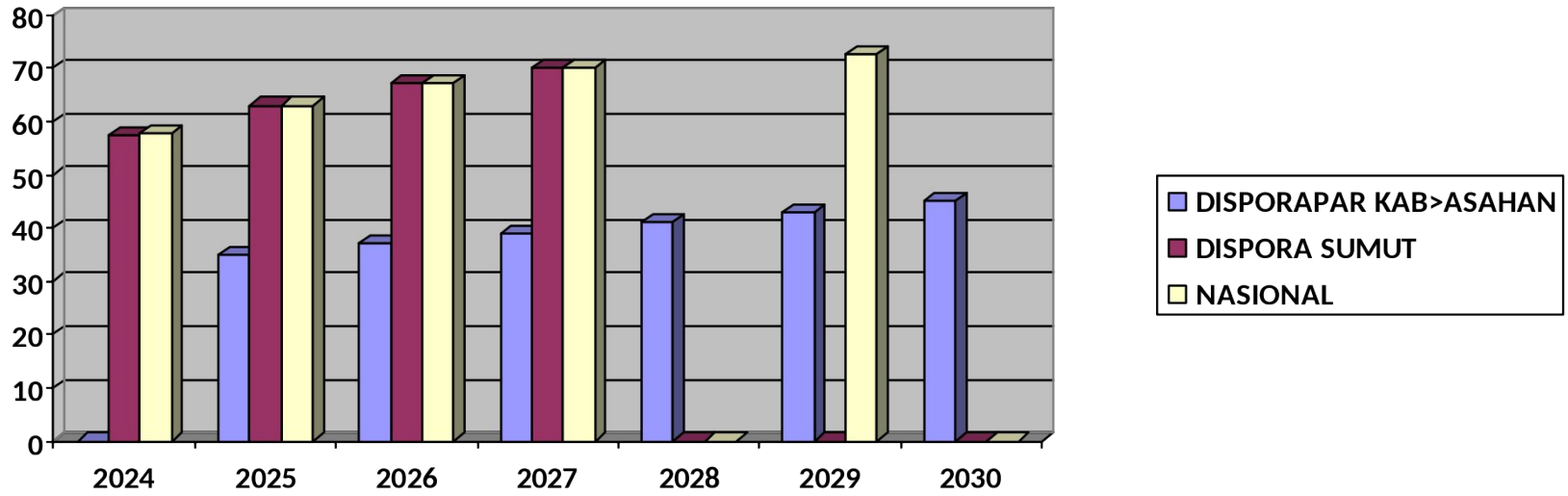


Diagram Target Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan Target Kementrian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari tahun 2024 target capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (NA) dan di tahun 2025 naik menjadi 35, sedangkan di tahun 2026 menjadi 37, dan di tahun 2027 meningkat menjadi 39, untuk tahun 2028 target capaian menjadi 41, dan di tahun 2029 naik lagi menjadi 43, kemudian di tahun 2030 kembali meningkat menjadi 45. Dengan demikian diharapkan nilai capaian yang ingin diraih dalam suatu periode tertentu dapat meningkat sebagai gambaran tingkat kemajuan pembangunan pemuda di Kabupaten Asahan.

Dan untuk target Provinsi Sumatera Utara dan Target Nasional terdapat beberapa kesamaan, dikarenakan target Provinsi mengacu pada target nasional.

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Pemuda Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan Tahun 2025 adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	35	-	-%

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan Tahun 2024 dan Tahun 2025 adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda,	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	-	35	-	-	-	-%

dan Prestasi Olahraga

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah adalah :

$$\text{Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi Kinerja s.d. Tahun Ini}}{\text{Target Jangka Menengah}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian (\%)} = \frac{-}{-} \times 100\ \%$$

$$= -\ \%$$

- Realisasi IPP s.d. 2025 = **-**
- Target jangka menengah (Target Provinsi) = **-**

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan Tahun 2025 dengan Target Nasional adalah :

$$\text{Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi Kinerja s.d. Tahun Ini}}{\text{Target Nasional}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian (\%)} = \frac{-}{63} \times 100\ \%$$

$$= -\ \%$$

- Realisasi IPP s.d. 2025 = **-**
- Target Nasional = **63**

Sampai saat ini Kemenpora belum merilis realisasi IPP pada tahun 2025 dikarenakan yang berhak untuk menghitung realisasi dan capaian IPP adalah Kemenpora berdasarkan data dari BPS. Dengan demikian realisasi dan capaian IPP

untuk Kabupaten Asahan masih belum dikatahui, menunggu hasil dari kemenpora. Namun yang berhak dilakukan oleh Kabupaten adalah melaksanakan indikator dari domain IPP. Contohnya untuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan terdapat pada domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja dengan indikator pemuda wirausaha dengan pelatihan kewirausahaan.

Strategi atau solusi untuk meminimalisasi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda sebagai berikut:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dilakukan melalui penguatan akses pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan pemuda, perluasan kesempatan kerja, penguatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda, serta pemenuhan kesetaraan gender secara terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Dilaksanakannya Kegiatan-kegiatan pada indikator lima domain yang mendorong akses pemuda.
3. Indeks Pembangunan Pemuda dilaksanakan oleh Pusat dan pusat memperoleh data dari BPS, sedangkan Dinas hanya melaksanakan kegiatan indikator pada lima domain utama Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
4. Optimalisasi kerjasama antara lembaga yang terkait dengan pembinaan Pemuda melalui Fasilitasi kelompok Pemuda/masyarakat dan memperbanyak pelaksanaan pelatihan bersama.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Mendukung program dan kegiatan Kepemudaan yang disusun oleh pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Dinas.
2. Memfasilitasi masyarakat Asahan dalam berwirausaha dengan menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan;
3. Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan, namun masih dalam sekala kecil dikarenakan keterbatasan anggaran.

6. *Indikator* Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Depelopment Index)

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan olahraga di suatu daerah. IPO melihat olahraga bukan hanya prestasi, tapi juga partisipasi, sarana, SDM, dan tata kelola**.**

Tujuan IPO

- Menilai kinerja pembangunan olahraga daerah
- Dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan olahraga
- Membandingkan capaian antar daerah dan antar tahun
- Mendukung peningkatan kesehatan, produktivitas, dan prestasi

Dimensi Indeks Pembangunan Olahraga

IPO umumnya terdiri dari 4 dimensi utama**:**

1. Partisipasi Olahraga

Menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga.
Contoh indikator:

- Persentase penduduk yang berolahraga secara rutin
- Frekuensi aktivitas olahraga Masyarakat

2. Ruang Terbuka & Sarana Prasarana Olahraga

Ketersediaan dan akses fasilitas olahraga.
Contoh indikator:

- Jumlah sarana/prasarana olahraga layak
- Ketersediaan ruang terbuka publik untuk olahraga

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Olahraga

Kualitas dan kuantitas pelaku olahraga.
Contoh indikator:

- Jumlah pelatih, wasit, instruktur bersertifikat
- Tenaga keolahragaan aktif

4. Prestasi Olahraga

Capaian atlet dan daerah dalam kompetisi.
Contoh indikator:

- Perolehan medali pada kejuaraan
- Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi/nasional

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan telah menetapkan target capaian kinerja Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Asahan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2030. Adapun target yang dimaksud adalah sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat	Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30

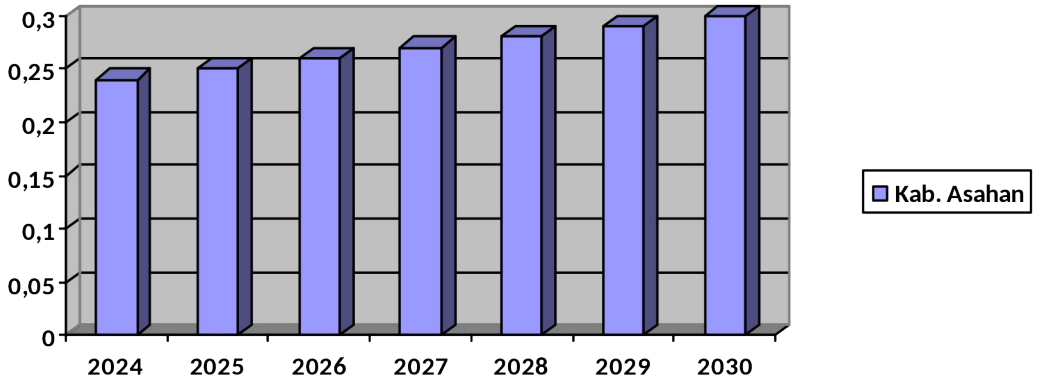


Diagram Target Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan

Dari diagram di atas dapat di lihat bahwa target Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) untuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya target Indeks Pambangunan Olahraga (IPO) pada Dias Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan dapat memicu peningkatan terhadap capaian Indeks Pambangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Asahan.

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan Tahun 2025 adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karakter Pemuda, dan Prestasi Olahraga	**Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)**	0,25	0	0,00%

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan Tahun 2024 dan Tahun 2025 adalah :

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Depelopment Index)
pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.14

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Depelopment Index)

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	8
N/A	N/A	N/A	0,24	0.27	112,5	0,25	0	0,00

Sumber Data : Dinas Pemuda,Olah Raga dan Pariwisasta Kab. Asahan (2025)

Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang **Sangat Baik** dengan nilai 0,27 atau mencapai target yang ditetapkan atau maningkat dari target sebesar 0,24. Sedangkan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang **Sangat Minim** dengan nilai 0 (Nol) atau tidak mencapai target yang ditetapkan atau

tertinggal dari target sebesar 0,25. Sehingga berpengaruh terhadap capaian pada tingkat Provinsi maupun Nasional.

Tercapainya Indeks Pembangunan Olahra (IPO) pada Tahun 2024 didukung oleh :

- Jumlah Ruangan terbuka yang memadai;
- Cukup banyak masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam melakukan olahraga rutin;
- Sudah terdapatnya guru-guru olahraga di daerah yang jauh dari pusat kota.

Belum tercapainya indikator kinerja Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) tahun 2025 disebabkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja IPO sebagai berikut:

a. Kurang optimalnya kerjasama antara lembaga yang terkait dengan pembinaan olahraga.
b. Kurangnya sinergitas antara pelaksanaan pembinaan olahraga masyarakat dan olahraga pendidikan dalam melaksanakan pelatihan dan penyelenggaraan event.
c. Kurangnya kegiatan pembinaan olahraga.
d. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga yang ada ditengah masyarakat yang belum memenuhi standar.

Strategi atau solusi untuk meminimalisasi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja IPO sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yaitu bangunan fasilitas olahraga yang memadai dan modern.
b. Pengembangan SDM dengan latihan atlet dan pelatih profesional.
c. Promosi Olaharaga dengan mengajak masyarakat aktif berolahraga.
d. Kerjasama dengan kolaborasi dengan lembaga dan sponsor.
e. Pembinaan Atlet dengan mendukung Atlet berbakat.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dinas;
- Melaksanakan kegiatan olahraga bersama Masyarakat melalui car free day;

- Melakukan Pembinaan terhadap Atlet berprestasi.

Selanjutnya untuk capaian Misi 2 Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Perekonomian Daerah melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif, Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Komoditas Unggulan, Pertanian serta Pengelolaan Ekonomi Biru dan Ketahanan pangan dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 3	:	**Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat**

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari semakin baiknya kondisi kesehatan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kesakitan dan kematian, serta meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada pelayanan kesehatan yang merata, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan, serta memperluas jangkauan pelayanan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat juga menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik. Program edukasi kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kondisi kesehatan masyarakat semakin membaik yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah.

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Sasaran 3 dengan 1 indikator

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	**73,9**	**73,93**	100,04	Sangat Baik	74,90	98.70

Sumber Data : Dinas Kesehatan (2025)

Dari table diatas Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Asahan Tahun 2025 mencapai 73,93 tahun atau 100,04% dari target yang ditetapkan sebesar 73,90 tahun, sedangkan Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan taget akhir RPJMD 98,78%.

.

7. Indikator usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) adalah ukuran statistik yang menggambarkan rata-rata perkiraan lama hidup (dalam tahun) yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola mortalitas (angka kematian) pada saat itu tetap.

Indikator yang digunakan dalam UHH

UHH tidak berdiri sendiri, tetapi dihitung dari beberapa indikator pendukung, antara lain:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Semakin rendah AKB, semakin tinggi UHH.
2. Angka Kematian Balita Menunjukkan kualitas kesehatan anak usia dini.
3. Angka Kematian Menurut Kelompok Umur Digunakan dalam tabel mortalitas (life table).
4. Akses dan Kualitas Pelayanan KesehatanTermasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan imunisasi.
5. Status Gizi MasyarakatGizi yang baik meningkatkan daya tahan hidup.
6. Sanitasi dan Lingkungan Hidup Air bersih, sanitasi layak, dan lingkungan sehat berpengaruh besar.
7. Tingkat Pendidikan dan Perilaku Hidup Sehat Pendidikan memengaruhi pola hidup dan kesadaran kesehatan.

Fungsi UHH

- Menjadi indikator kesehatan masyarakat
- Salah satu komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Alat evaluasi keberhasilan pembangunan bidang kesehata

Adapun Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Pengukuran Capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH)

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2	3	4	5	6	7	8	8	9
						73,9	73,93	100,04

Sumber Data : Dinas Kesehatan (2025)

Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Asahan Tahun 2025 mencapai 73,93 tahun atau 100,04% dari target yang ditetapkan sebesar 73,90 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator Indeks Kesehatan telah tercapai sesuai perencanaan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pelaksanaan program kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi dasar untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan Indeks Usia Harapan Hidup (UHH) ***tersebut antara lain:***

1. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan :

Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pelaksanaan program kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan peningkatan

derajat kesehatan masyarakat dan menjadi dasar untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Sasaran 4	:	Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta pemenuhan hak anak

Seiring dengan menigkatnya kesadaran akan pentingnya pariwisata berbasis budaya,, berbagai daerah kini semangkin menonjolkan kekayaan seni dan kearifan local sebagai daya tarik utama. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, tetapijuga untuk menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun.

Kelestarian seni dan budaya local semakin mendapat perhatian denganadanya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Berbagai festival budaya, pertunjukan seni tradisional, serta pelestarian kuliner khas daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengembangan wisata. Dengan cara ini, seni dan tradisi tidak hanya lestari , tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain itu nilai-nilai kearifan local, seperti keramahan, gotong royong, serta cara hidup yang selaran dengan alam, turut memperkaya pengalaman wisatawan. Pengelolaan wisata berbasis komunitas,seperti desa wisata dan ekowisata, semakin menunjukkan bahwa budaya dan lingkungan dapat berkembang bersama secara berkelanjutan.

Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat, promosi, yang efektif,serta keterlibatan masyarakat yang aktif, seni buda dan kearifan lokal tdak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga ,enjadi motor penggerak utama dalam membangun pariwisata yng berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Sasaran Meningkatnya Kelestarian Potensi Seni Budaya Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Sinergi dengan Pengembangan Wisata Daerah menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 yaitu "*Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usahadan Pemanfatan Potensi Unggulan Daerah Dalaam Rangka Mendorong Perkonomian Daerah*" serta tujuan "*Meningkatkan meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah*"

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Indeks Pembangunan berwawasan Kependudukan (IPKB)	75,20	66,50	66,50	Baik	88,1	85,35
2.	Indeks Pembangunan Genjer	91,91	92,06	100,95	Sangat Baik	91,93	100,14
3.	Rasio Kekerasan anak	0,165	0,048			0,1500	

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 4 tahun 2025.

8. Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kepedudukan (IPKB)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk menjadi subjek maupun objek dalam pembangunan. IPBK juga bermakna pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana pembangunan dapat dipercepat jika SDM meningkat. IPBK adalah suatu indeks komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan memperhatikan dimensi kependudukan yang mencakup kualitas penduduk, persebaran, dan peranannya dalam pembangunan.

Aspek kependudukan dalam pembangunan sangat penting karena kependudukan dan pembangunan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional maupun daerah, sehingga untuk mengevaluasinya digunakan angka IPBK.

IPBK menggunakan skala 0-100 dan bermakna positif. Artinya, nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan bahwa kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah semakin baik. IPBK adalah indikator penting karena merupakan penanda apakah pembangunan yang telah berjalan sudah menjadikan penduduk bukan hanya sebagai objek, namun juga subjek pembangunan. Selain itu, juga bagaimana pembangunan tetap memerhatikan peningkatan kualitas penduduk sehingga penduduk dapat menjadi bahan bakar pembangunan, yang kemudian hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.

IPBK dibentuk dari 5 (lima) dimensi pembangunan berwawasan kependudukan yang meliputi :

a. Dimensi Partisipasi,
b. Dimensi Keberlanjutan,
c. Dimensi Inklusivitas,
d. Dimensi Holistik Integratif, dan
e. Dimensi Kesetaraan.

Kelima dimensi ini dapat menunjukkan proses pembangunan yang berwawasan kependudukan di suatu daerah.

Rumus IPKB adalah :

$$\mathbf{IPKB} = \sum_{i=1}^{n} (w_i \times I_i)$$

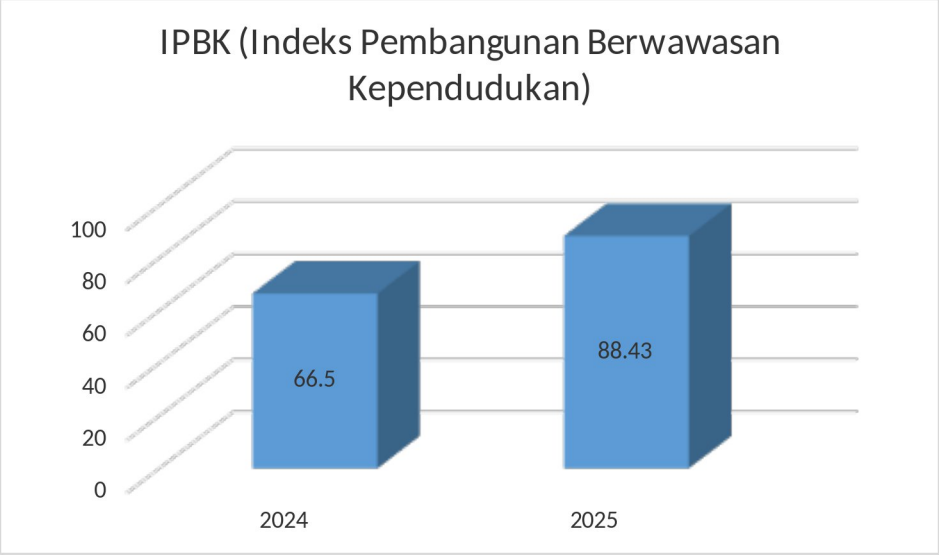
Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.18

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
DINAS P2KBP3A KABUPATEN ASAHAN					
1	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	66.5	75.2	66.5	88.43

Gambar Grafik Capaian tahun 2024 dan Tahun 2025 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah :



Terlihat dari grafik diatas dalam hal capaian ada kenaikan dari tahun 2024 capaian 66.5 % menjadi 88.43% pada tahun 2025 hal ini disebabkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), adapun Kenaikan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) disebabkan

oleh perbaikan kualitas dan pengelolaan aspek kependudukan dalam pembangunan. Secara ringkas, faktor-faktor utamanya meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
    - Naiknya tingkat pendidikan penduduk
    - Meningkatnya derajat kesehatan (angka harapan hidup, gizi, akses layanan kesehatan)
2. Pengendalian kuantitas dan struktur penduduk
    - Penurunan laju pertumbuhan penduduk
    - Keberhasilan program KB
    - Struktur umur penduduk yang lebih seimbang (bonus demografi dimanfaatkan dengan baik)
3. Peningkatan kesejahteraan penduduk
    - Turunnya angka kemiskinan
    - Meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja
    - Berkurangnya ketimpangan sosial
4. Persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih merata
    - Urbanisasi yang terkendali
    - Pemerataan pembangunan antarwilayah
5. Penguatan kebijakan dan tata kelola pembangunan berwawasan kependudukan
    - Integrasi data kependudukan dalam perencanaan pembangunan
    - Sinergi program kependudukan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
6. Peningkatan perlindungan kelompok rentan
    - Perbaikan layanan bagi anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas

9. Indikator Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Pembangunan Gender salah satu isu yang utama dibahas dalam pembangunan, khususnya untuk pembangunan sumber daya manusia. Meskipun telah banyak upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, seperti dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional namun masih banyak terdapat kesenjangan pembangunan antar laki-laki dan perempuan di seluruh provinsi di Indonesia. Komponen penyusun IPG terdiri dari :

a. Dimensi pendidikan,
b. Dimensi kesehatan, dan
c. Dimensi ekonomi.

Dari faktor kesehatan yang mungkin dapat dilihat dari persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, berdasarkan aspek pendidikan yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan berdasarkan aspek ekonomi, dalam pembangunan ekonomi terdapat masalah yang terjadi yang cukup serius yaitu pengangguran.

Rumus Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah :

$$\mathbf{IPG} = \frac{1}{3}\left(\frac{P_{par}}{L_{par}} + \frac{P_{prof}}{L_{prof}} + \frac{P_{pend}}{L_{pend}}\right) \times 100$$

Interpretasi Nilai IPG :

- IPG = 100 → Pemberdayaan perempuan dan laki-laki setara
- IPG < 100 → Perempuan belum setara dengan laki-laki

- IPG > 100 → Perempuan lebih berdaya dibanding laki-laki

Tabel 3.19

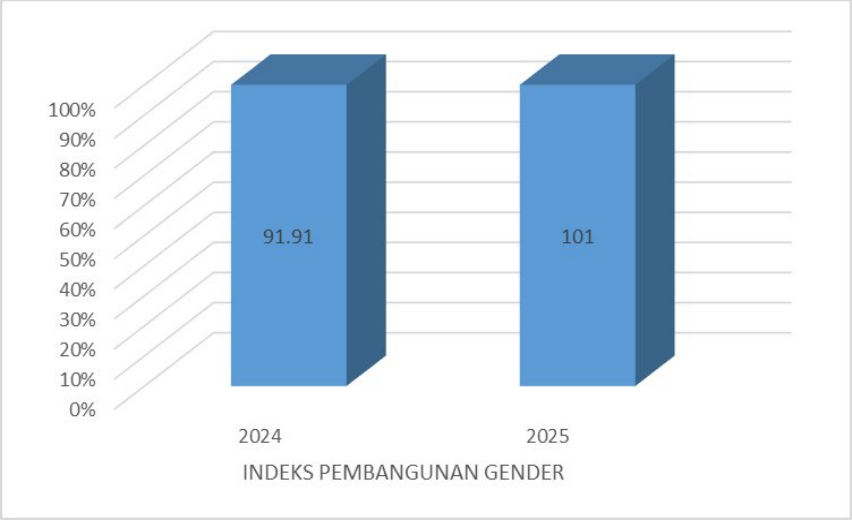
Adapun Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.18

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
DINAS P2KBP3A KABUPATEN ASAHAN					
1	Indeks Pembangunan Gender	91,91	91,91	92,06	101

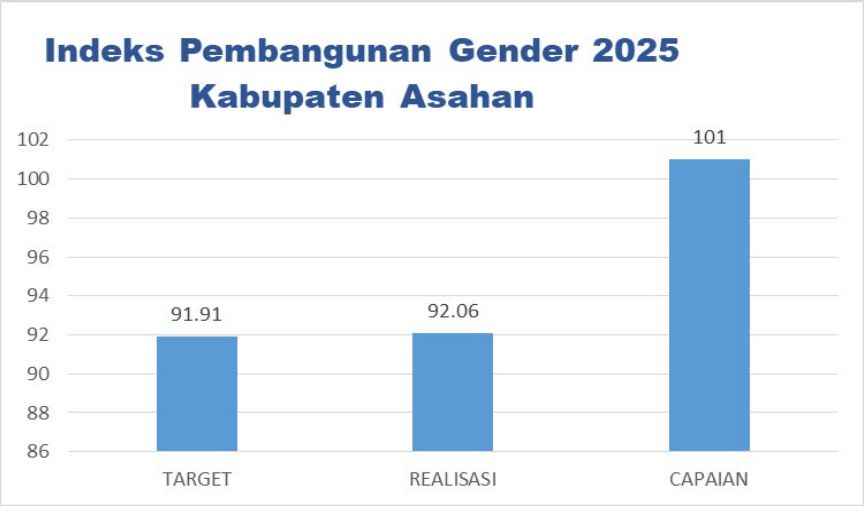
Gambar Grafik Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025 Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah :



Terlihat dari grafik diatas dalam hal realisasi ada kenaikan dari tahun 2024 capaian 91.91 % menjadi 101% pada tahun 2025 hal ini disebabkan oleh meningkatnya Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

dengan kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi

Gambar Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 dapat dilihat target 91.91, realisasi 92.06 dan capaian 101%



Dari penjelasan Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 diatas dapat dilihat target 91.91, realisasi 92.06 dan capaian 101%artinya mengalami perbaikan dan kenaikan yang baik. Kedepannya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten asahan lebih meningkatkan program-program dan kegiatan pembangunan gender.

10. Indikator Rasio Kekerasan terhadap Anak (Per 10.000)

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk anak, dinyatakan per 10.000 anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak:

1. Kekerasan fisik
   Pemukulan, penganiayaan, penyiksaan, atau tindakan lain yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada anak.
2. Kekerasan psikis
   Penghinaan, ancaman, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan mengganggu perkembangan mental anak.
3. Kekerasan seksual
   Pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau melibatkan anak dalam aktivitas seksual.
4. Penelantaran anak
   Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.
5. Eksploitasi anak
   Pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi, sosial, atau seksual yang merugikan anak.

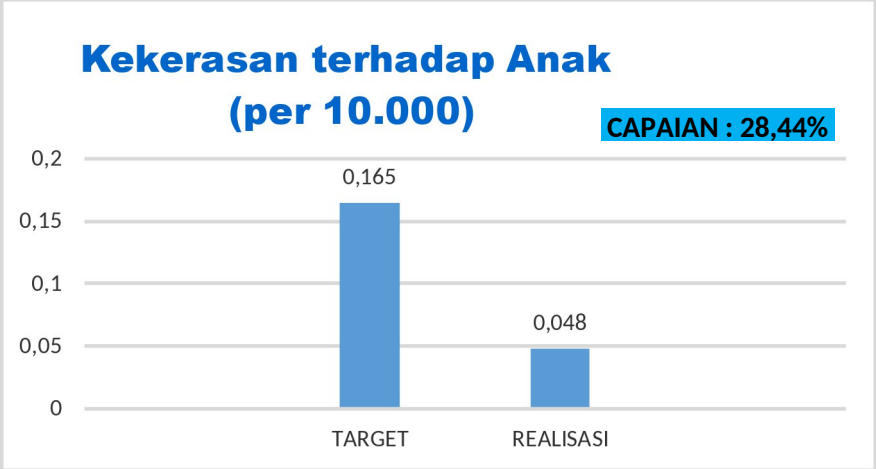
Rumus Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) adalah :

$$\text{Rasio Kekerasan terhadap Anak} = \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah penduduk anak (0–17 tahun)}} \times 10.000$$

Data Tabel Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) adalah :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
DINAS P2KBP3A KABUPATEN ASAHAN					
1	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)	0.176	0.165	0.048	28,44%

Gambar Grafik Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) tahun 2025 adalah :



Dari grafik diatas ada kenaikan disebabkan masih diperlukan eksistensi dan kerja keras terkait perlindungan terhadap anak di Kabupaten Asahan. Dan diharapkan dengan adanya UPT. PPA dan KPAD Kabupaten Asahan tahu mendatang bisa mengalami perbaikan terhadap perlindungan anak di Kabupaten Asahan. Kekerasan anak di Kabupaten Asahan cukup signifikan perkembangannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak anak menjadi korban, antara lain:

1. Faktor keluarga
    - Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua
    - Pola asuh yang salah (kekerasan, penelantaran, atau permisif)
    - Masalah ekonomi keluarga
2. Faktor lingkungan sosial
    - Lingkungan tempat tinggal yang tidak aman
    - Pengaruh teman sebaya yang negatif
    - Budaya kekerasan dan normalisasi perilaku menyimpang
3. Faktor ekonomi
    - Kemiskinan

- Anak terpaksa bekerja
- Ketergantungan ekonomi pada pihak lain

4. Faktor pendidikan
    - Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua
    - Minimnya edukasi tentang hak-hak anak dan perlindungan diri
5. Faktor teknologi dan media
    - Penyalahgunaan media sosial dan internet
    - Paparan konten tidak layak usia
    - Kurangnya literasi digital
6. Faktor kelembagaan dan hukum
    - Lemahnya perlindungan dan penegakan hukum
    - Kurangnya akses layanan perlindungan anak
    - Rendahnya pelaporan kasus
7. Faktor psikologis dan sosial anak
    - Anak dalam kondisi rentan (disabilitas, trauma, ketergantungan)
    - Ketidakmampuan anak menolak atau melapor

Selanjutnya untuk capaian Misi 2 dengan Indikator Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka dapat dilihat dari data berikut:

MISI 2	**:**	**Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Perekonomian Daerah Melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif, Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Komuditas Unggulan, Pertanian serta Pengelolaan Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan.**
Sasaran	:	Meningkatnya Daya dukung Ekosistem berusaha, Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi Sektor Ekonomi Daerah.

Sasaran 5	:	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari semakin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya pendapatan, serta membaiknya kualitas hidup

dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari berbagai indikator pembangunan, antara lain meningkatnya daya beli masyarakat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, meningkatnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan layanan publik yang lebih baik dan merata. Pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, perdagangan, serta peningkatan investasi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan kesejahteraan rakyat dapat terus meningkat secara merata dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya ditandai dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan meningkatnya kualitas hidup, rasa aman, serta kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Tabel : 3.20
Pengukuran Capaian Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Tingkat Kemiskinan	7,5-7	7,18	100 (Tercapai)	Sangat Tinggi	3,75-3,25	
2.	Tingkat Pengangguran terbuka	5,5-5,69	5,46	100 (Tercapai)	Sangat Tinggi	5,41-5,03	

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 5 tahun 2025.

11. Indikator Tingkat Kemiskinan

Tujuan Renstra dan RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan. Angka kemiskinan pada tahun 2023 adalah 61,69 ribu jiwa (8,21%), pada tahun 2024 menjadi 61,34 ribu jiwa (8,12%) dan di tahun 2025 angka kemiskinan mencapai 54,57 ribu jiwa (7,18%).

Berikut adalah grafik persentase penduduk miskin Kabupaten Asahan Tahun 2023-2025 :



Adapun Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.21
Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan

2023			2024			2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**
4	**5**	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**	**10**	**11**
N/A	8,21	N/A	N/A	8,12	N/A	7,50-7	7,18	100 (Tercapai)

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Asahan (2025)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan pada pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren yang menurun. Penurunan ini menggambarkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya efektivitas berbagai program pembangunan yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tingkat Kemiskinan ***tersebut antara lain:***

Meningkatnya kesempatan kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, berbagai intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tren penurunan ini juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memperluas akses terhadap sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai

memberikan hasil yang positif. Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan terhadap sektor ekonomi produktif menjadi faktor penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin

Upaya-upaya dalam rangka mempertahankan keberhasilan Tingkat Kemiskinan Pemkab. Asahan melaksanakan upaya-upaya diantara nya adalah sebagai berikut :
Tetap terus diperkuat melalui kebijakan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar tren penurunan tingkat kemiskinan dapat terus dipertahankan bahkan dipercepat pada tahun-tahun mendatang, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata.

12 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu atau alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam mengurangi jumlah penganggur dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dengan penjelasan sederhana Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan seberapa besar persentase angkatan kerja yang belum bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan penganggur.

Dengan rumus :

TPT (%) = (Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja) x 100%

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TPT	7,24	6,39	6,26	6,12	5,94	5,46



Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan setelah mengalami lonjakan pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, TPT mencapai angka tertinggi sebesar 7,24 persen, mencerminkan dampak pandemi terhadap pasar tenaga kerja. Namun, sejak tahun 2021, TPT mulai menurun secara bertahap, dari 6,39 persen pada tahun 2021 menjadi 6,26 persen pada tahun 2022, lalu turun lagi menjadi 6,12 persen pada tahun 2023, lalu turun lagi mencapai 5,94 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 turun lagi mencapai 5,46 persen .

Strategi atau solusi untuk pencapaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kesesuaian Tenaga Kerja.
2. Perluasan Lapangan Kerja.
3. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja.
4. Peningkatan Iklim Usaha dan Dunia Kerja.
5. Perlindungan dan Transisi Tenaga Kerja.

6. Peningkatan Kualitas Data dan Pengukuran TPT.
7. Pendekatan Spesifik Kelompok Rentan.

Gambar : 3.1

Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025





Selanjutnya untuk capaian Sasaran 6 sebagai berikut:

Sasaran 6	:	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan pangan Daerah menuju swasembada pangan.

Tabel 3.22
Pengukuran Capaian Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Indeks Ketahanan Pangan	70	70,66	100,94	Sangat Tinggi	73,34	96,34
2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	44,27	44,74	101,01	Sangat Tinggi	48,70	91,86

13. Indikator Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan adalah alat ukur komposit untuk menilai kondisi pangan di suatu wilayah berdasarkan indikator seperti ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan, yang membantu perumusan kebijakan untuk mengatasi kerawanan pangan dan menurunkan stunting.

Dalam menghitung Indeks Ketahanan Pangan menggunakan penjumlahan dari hasil perkalian bobot setiap indikator dengan nilai standarisasi indikator (z-score atau metode skala 0-100).

Indeks Ketahanan Pangan diukur berdasarkan 3 aspek utama :

- **Aspek Ketersediaan Pangan (Bobot 37-40%):** Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari, serta produksi padi/jagung/ubi.
- **Aspek Keterjangkauan Pangan (Bobot 20-30%):** Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, rumah tangga tanpa akses listrik, dan rata-rata lama sekolah perempuan.
- **Aspek Pemanfaatan Pangan (Bobot 30-40%):** Angka harapan hidup, persentase balita *stunting*, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih.

Formulasi perhitungan Indeks Ketahanan Pangan sebagai berikut :

$IKP = \sum (W_i \times S_i)$

- IKP = Indeks Ketahanan Pangan
- Wi = Bobot masing-masing indikator
- Si = Skor (standarisasi) indikator

Langkah-langkah Penghitungan:

- Standarisasi Data: Mengubah data mentah indikator menjadi skala 0-100 menggunakan metode *z-score* atau *distance to scale* agar indikator dengan satuan berbeda dapat dibandingkan.
- Pembobotan: Setiap aspek dan indikator diberikan bobot (weight) berdasarkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan.
- Agregasi: Menjumlahkan skor terstandarisasi yang telah dikalikan bobot untuk mendapatkan skor komposit.
- Pengelompokan: Hasil akhir dikelompokkan menjadi 6 kategori, mulai dari Prioritas 1 (Sangat Rentan) hingga Prioritas 6 (Sangat Tahan).

Gambar 3.2

Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Ketahanan Pangan tahun 2025





 Pemberian bantuan pangan pada kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga	 Menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah pusat di kec.simpang 4 dan kec.air joman
 Pemberian makanan tambahan lokal pada kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	 Pemberian bantuan pangan untuk keluarga risiko stunting dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

	
Gerakan pangan murah (gpm) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di halaman kantor dinas ketahanan pangan kabupaten asahan	Cek kualitas bantuan pangan pemerintah (perum bulog cabang asahan)
	
Sosialisasi b2sa goes to school dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan dapur b2sa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

	
Sidak pasar dan sidak kilang padi dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Kegiatan lomba cipta menu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

14. Indikator Kontribusi Sektor Pertanian , Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB.

Tabel 3.23

Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	5	6	7	8	9	10	11	12
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	44,27*	44,27**	100%

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Asahan (2025)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja Indikator Sasaran **"Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB"**

Ket :

* : angka sementara

** : angka sangat sementara

Realisasi Indikator Sasaran yaitu *Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)* diperoleh dari perhitungan yang dilakukan BPS Kabupaten Asahan dan dirilis awal Maret 2026. Oleh sebab itu yang tertera pada tabel di atas masih angka sementara dan angka sangat sementara.

Sasaran 7	:	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

Selama beberapa tahun terakhir, akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pembangunan jalan, jembatan, sarana transportasi publik, serta fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik semakin merata hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil. Pemerintah bersama sektor swasta berperan aktif dalam memperluas jaringan jalan tol, menghadirkan transportasi ramah lingkungan, dan memperkuat konektivitas digital melalui perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi.

Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya mempermudah mobilitas dan distribusi barang, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan mendorong pemerataan pembangunan. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Dampaknya terasa langsung pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi inklusif serta kesejahteraan sosial jangka panjang.

Tabel 3.24
Pengukuran Capaian Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir	Capaian s/d 2025

						RPJMD	
1.	Indeks infrastruktur Daerah	0,69	**0,73**	109,79	Sangat Baik	0,74	98,64%

15. Indikator Indeks Inprastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud meliputi infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan), infrastruktur dasar permukiman (air bersih, sanitasi), energi, telekomunikasi, serta sarana pendukung pelayanan publik lainnya.

Perkembangan Indeks Infrastruktur menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing wilayah, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan nilai Indeks Infrastruktur umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan, bertambahnya akses masyarakat terhadap air minum layak dan sanitasi, berkembangnya jaringan listrik dan telekomunikasi, serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Dengan demikian, peningkatan Indeks Infrastruktur menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah, karena menunjukkan adanya upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat fondasi

pembangunan serta mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Infastruktur pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tergambar dari tabel berikut:

Tabel 3.25
Capaian Indikator Indeks Infastruktur

2023			2024			2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**
4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Beda Satuan						0,69	0,73	105,79%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Asahan (2025)

Dari Tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja Indikator Sasaran "Indeks Infastruktur" pada tahun 2023 dan 2024 perbandingannya tidak dapat disajikan karena satuan pada tahun 2023 dan 2024 berbeda dengan tahun 2025

1. Faktor Keberhasilan

Capaian Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 104,35% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program, optimalisasi pemanfaatan anggaran, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta fokus intervensi pembangunan pada prioritas infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat.

2. Solusi yang dilakukan dalam mempertahankan keberhasilan indeks tersebut adalah :

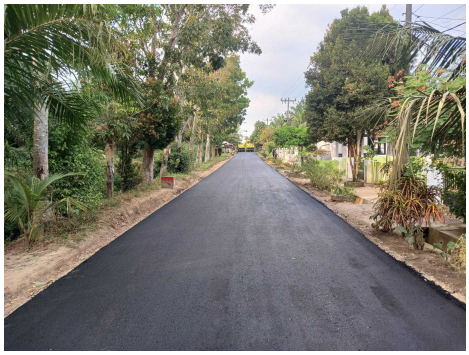
Untuk keinginan menjaga capaian kinerja tersebut, dilakukan penguatan perencanaan berbasis kebutuhan dan data spasial, peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi berbasis outcome, guna memastikan bahwa infrastruktur pembangunan tidak hanya memenuhi target output, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap

peningkatan aksesibilitas, konektivitas wilayah, dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Gambar 3.3

Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indeks Infrastruktur tahun 2025



Selanjutnya untuk capaian Misi 3 dapat dilihat dari informasi berikut:

MISI 3	**:**	**Meningkatkan Pemahaman, Pengalaman dan Memelihara Kerukunan dalam Kehidupan Beragama.**
Sasaran 8	:	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokrasi, Toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat.

Sasaran 8	:	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokrasi, Toleransi dan Kegotongroyongan di Masyarakat

Tabel 3.26
Pengukuran Capaian Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,3	78,5	100,25	Sangat Baik	79,1	99,24
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibun	58,03	58,33	100,51	Sangat Baik	70,50	82,73

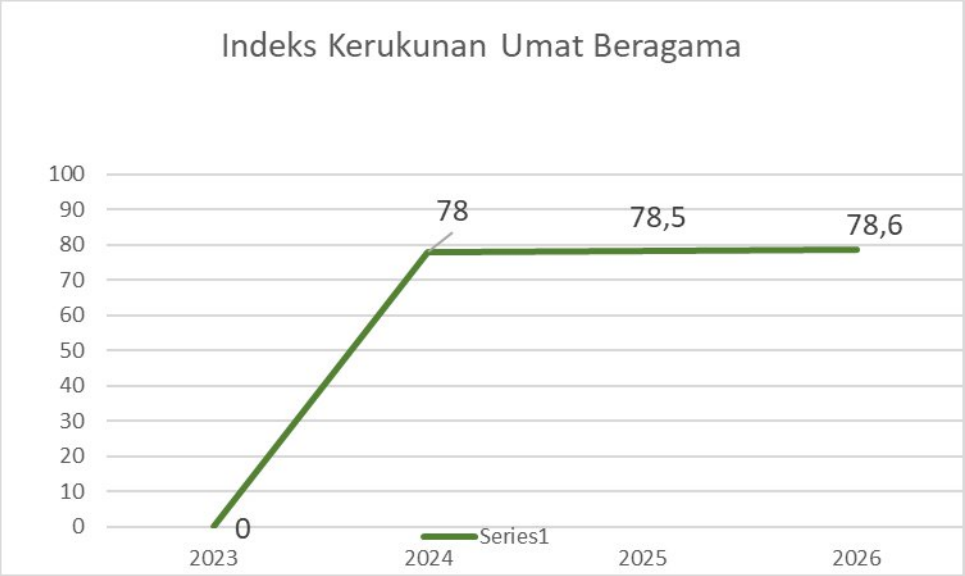
16. Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan antarumat beragama dalam suatu wilayah (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota). IKUB dihitung oleh Kemenag Kab. Asahan. Tujuan dilakukannya perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah :

1. Menilai kualitas hubungan antarumat beragama
2. Mengidentifikasi potensi konflik sosial berbasis agama
3. Menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program kerukunan
4. Membandingkan tingkat kerukunan antarwilayah dan antar waktu

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) terdiri dari 3 dimensi utama , yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama. Adapun Sumber Data IKUB berasal dari Kemenag Kab. Asahan. Cara menghitung Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah :

$$\text{IKUB} = \frac{\text{TOLERANSI} + \text{KESETARAAN} + \text{KERJA SAMA}}{3}$$



Di Kabupaten Asahan, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tidak dilakuakan perhitungan pada tahun 2023 , sedangkan pada Tahun 2024, telah dilakukannya perhitungan IKUB yang dilakukan oleh Kemenag Kab. Asahan, dengan nilai Rilis Sebesar 78. Untuk Pada Tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar 78,5 (Naik 0,5).

Untuk Nasional, Nilai dari Indeks Harmoni Indonesia (IHai) belum ada, sehingga belum bisa dijadikan sebagai pembanding, sedangkan untuk Nilai dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Pada Tahun 2024 berada di angka 76, 47 (Nasional) dan 80,88 (Provinsi).

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa perkembangan IHAi Kab. Asahan berada pada kondisi yang baik dan sejalan dengan Nasional dan Provinsi. Pada tingkat provinsi, IHAi Sumatera Utara memiliki tren meningkat sejalan dengan peningkatan IHai di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut IHai Kab. Asahan mengalami peningkatan dengan nilai yang masih lebih rendah tetapi tidak jauh berbeda dari Ihai tingkat nasional dan Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keharmonisan sosial masyarakat Kab. Asahan cukup baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Indeks Harmoni Indonesia (IHai) yang merupakan indikator tujuan Bupati, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang menjadi indikator

kinerja OPD, tidak memiliki data yang akurat di 5 Tahun terakhir, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan Realisasi denga target akhir RPJMD. Hal tersebut menjadi kendala dikarenakan :

1. Perhitungan IHai, masih baru , dan masih harus dilakukan sosialisasi oleh Kemendagri, sehingga datanya masih di Rilis oleh Kemendagri
2. Berbedanya Indikator Tujuan , yang sebelumnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), menjadi Indeks Harmoni Indonesia (IHai), sehingga harus dilakukannya sosialisasi dan penerapan cara perhitungan.
3. Tidak adanya target dan metode yang jelas dari Kemendagri untuk menghitung Indek Harmoni Indonesia (IHai), terkhusus di Daerah.
4. Tidak dapat ditentukan mana yang menjadi kegiatan prioritas yang menjadi factor dalam mendukung perhitungan Indeks Harmoni Indonesia (IHai) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), oleh sebab itu, maka saat ini data yang didapat bersumber dari Kemendagri dan Kemenag Kab. Asahan.

Gambar 3.4

Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target , Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025









17. Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlimas

Pelaksanaan urusan **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)** merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Trantibumlinmas dilaksanakan melalui upaya **pencegahan, penindakan, dan penanggulangan** terhadap berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya tersebut diwujudkan melalui penegakan **Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**, pengendalian aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, serta penanganan konflik sosial secara persuasif dan terkoordinasi.

Dalam aspek **perlindungan masyarakat**, pemerintah daerah berperan aktif dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat menghadapi kondisi darurat, termasuk bencana alam dan nonalam. Penguatan peran **Satuan**

Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan pelibatan aktif dalam kegiatan pengamanan lingkungan, penanganan bencana, serta dukungan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan Trantibumlinmas juga didukung oleh peningkatan kapasitas **kelembagaan dan sumber daya aparatur**, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, melalui pemenuhan sarana dan prasarana operasional, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan unsur TNI, Polri, dan perangkat daerah terkait.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Trantibumlinmas diarahkan untuk mewujudkan **stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah**, meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan.

Top of Form

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Trantibumlinmas
sejak Tahun 2023 sd Tahun 2025

2023	2024	2025

Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	5	6	7	8	8	9	10	11
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58,3	58,3	100

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asahan (2025)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Realisasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas dari tahun 2023 sampai 2024 tidak dapat disajikan di karenakan indikotor Penyelenggaraan Trantibumlinmas tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2025 merupakan tahun pertama dengan capaian 100%

Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Trantibumlinmas

1. Ketersediaan Regulasi yang Jelas dan Implementatif
   Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang jelas, tegas, dan mudah diimplementasikan menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur
   Kualitas dan kuantitas aparatur, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Trantibumlinmas. Hal ini mencakup kompetensi, profesionalisme, serta dukungan sarana dan prasarana operasional.
3. Melakukan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor
   Pelaksanaan Trantibumlinmas membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan unsur TNI, Polri, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait guna memastikan penanganan gangguan ketertiban berjalan efektif dan terpadu.
4. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
   Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan serta keterlibatan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk melalui peran Satlinmas dan lembaga kemasyarakatan, menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib.

5. Mengadakan Pendekatan Preventif dan Persuasif Keberhasilan Trantibumlinmas tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan hukum, tetapi juga oleh upaya pencegahan melalui sosialisasi, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
6. Ketersediaan Anggaran dan Dukungan Sarana Prasarana Dukungan anggaran yang memadai serta ketersediaan fasilitas operasional, seperti kendaraan patroli, peralatan komunikasi, dan perlengkapan pengamanan, sangat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Trantibumlinmas.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang terukur memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Langkah-Langkah Mempertahankan Keberhasilan Pelaksanaan Trantibumlinmas sebagai berikut :

1. Melakukan Peningkatan Kapasitas Aparatur Secara Berkelanjutan Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi aparatur, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, agar mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan potensi gangguan ketertiban yang terus berkembang.
2. Menjaga ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana operasional, termasuk kendaraan patroli, peralatan komunikasi, dan perlengkapan pengamanan, guna mendukung pelaksanaan tugas secara optimal dan responsif.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kerja sama dengan unsur TNI, Polri, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait melalui forum koordinasi rutin dan mekanisme penanganan terpadu terhadap gangguan Trantibumlinmas.
4. Mengintensifkan kegiatan pencegahan melalui sosialisasi peraturan daerah, pembinaan masyarakat, dan edukasi publik guna meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban umum.
5. Memberdayakan masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat secara berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan, serta pelibatan aktif dalam kegiatan pengamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta melakukan penyempurnaan kebijakan dan program Trantibumlinmas secara berkelanjutan.

Gambar 3.5
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Trantibumlinmas





Sasaran 9	:	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa

Tabel 3.28
Pengukuran Capaian Sasaran 9

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Indeks Pelayanan Publik	3,28	4,28	130,88	Sangat Baik	3,65	117.26
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,09	87,88	100,90	Sangat Baik	88,31	99,51
3.	Indeks Akses Keuangan Daerah	3,95		Belum liris		4,04	
4.	Indeks Kepuasan Korupsi	93	87,52	94,10	Sangat Baik	96,5	90.69
5.	Indeks Desa	0,6857	0,6883	100,38	Sangat Baik	0,7057	97,53

Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. IPP menggambarkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan, tata kelola, inovasi, serta dampak layanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan penilaian IPP mengacu pada kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pelayanan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Penilaian ini dilakukan secara objektif untuk memastikan bahwa pelayanan publik telah memenuhi prinsip keadilan, keterjangkauan, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil IPP menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja unit pelayanan, mengidentifikasi area yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, IPP tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat.

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik
sejak Tahun 2023 sd Tahun 2025

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	5	6	7	8	8	9	10	11
N/A			N/A	3,17		3.27	4,28	130,88

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdakab. Asahan (2025)

Tabel 3.30
Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 3 Tahun 2025 Skor dan Status Kinerja Indeks Pelayanan Publik terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota

NO	INSTANSI	INDEKS	KATEGORI
1	Kota Medan	4,54	A
2	Kabupaten Deli Serdang	4,49	A
3	Kabupaten Langkat	4,43	A-
4	Kabupaten Asahan	4,28	A-
5	Kota Padang Sidempuan	4,10	A-
6	Kabupaten Dairi	4,10	A-
7	Kabupaten Tapanuli Selatan	4,00	B
8	Kabupaten Simalungun	3,97	B
9	Kota Tebing Tinggi	3,90	B
10	Kabupaten Labuhan Batu	3,79	B
11	Kabupaten Samosir	3,73	B
12	Kabupaten Nias	3,72	B
13	Kota Tanjung Balai	3,72	B
14	Kabupaten Batu Bara	3,68	B
15	Kabupaten Karo	3,67	B
16	Kota Gunungsitoli	3,66	B
17	Kabupaten Humbanghasundutan	3,49	B-
18	Kabupaten Labuhan Batu Utara	3,46	B-
19	Kabupaten Tapanuli Utara	3,45	B-
20	Kota Binjai	3,32	B-
21	Kabupaten Mandailing Natal	2,78	C
22	Kabupaten Nias Selatan	2,57	C
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,27	C-
24	Kabupaten Latuhan Batu Selatan	2,01	C-
25	Kabupaten Padang Lawas	2,54	C

26	Kabupaten Nias Barat	1,54	D
27	Kota Pematang Siantar	N/A	N/A
28	Kota Sibolga	N/A	N/A
29	Kabupaten Padang Lawas Utara	N/A	N/A
30	Kabupaten Nias utara	N/A	N/A
31	Kabupaten Pakpak Bharat	N/A	N/A
32	Kabupaten Serdang Bedagai	N/A	N/A
33	Kabupaten Toba	N/A	N/A

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab. Asahan (2025)

Dari data di atas terlihat bahwa Kabupaten Asahan berada di urutan ke-4 dari 33 Kabupaten se Sumatera Utara dengan Skor Nilai 4,28 degan kategori A-

Faktor Keberhasilan Indeks Pelayanan Publik

Keberhasilan capaian IPP didukung oleh komitmen pimpinan, penerapan standar pelayanan yang konsisten, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengaduan dan evaluasi pelayanan.

Langkah-Langkah Mempertahankan Keberhasilan Indeks Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Memastikan pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah terus menanamkan budaya pelayanan prima yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, serta menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas berkelanjutan.
2. Mempertahankan kepatuhan terhadap standar pelayanan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk penerapan standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan SOP secara konsisten di seluruh unit layanan.
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pelayanan publik guna meningkatkan kompetensi teknis, etika pelayanan, serta integritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
4. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi kualitas layanan, termasuk tindak lanjut hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik dan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan.

5. Mempertahankan dan mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan transparansi pelayanan publik.
6. Mendorong partisipasi masyarakat melalui survei kepuasan, pengelolaan pengaduan, dan forum konsultasi publik sebagai dasar perbaikan mutu layanan secara berkelanjutan.
7. Menjaga kelayakan fasilitas pelayanan, termasuk ruang layanan, aksesibilitas bagi kelompok rentan, serta kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna layanan.
8. Menyediakan informasi layanan yang jelas, mudah diakses, dan terbuka sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

19. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. IKM mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, hingga sikap dan kompetensi petugas pelayanan.

Pelaksanaan pengukuran IKM dilakukan secara berkala dan sistematis sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja pelayanan publik. Hasil pengukuran IKM digunakan sebagai dasar dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil IKM melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan kompetensi aparatur, penyederhanaan prosedur, serta pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan

dan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, IKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
sejak Tahun 2023 sd Tahun 2025

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	5	6	7	8	8	9	10	11
	83,43	83,43		86,84		87,09	87,88	100,90

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdakab. Asahan (2025)

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Hasil Survey Indeks Pelayanan Pemerintah Kabupaten Asahan memperoleh hasil sebesar **87,88** dari target yang ditentukan sebesar **87,09 atau 100,90%.** Hal ini berarti bahwa capaian indikator pada tahun 2025 tersebut termasuk dalam katagori capaian Sangat Berhasil. Untuk tahun 2023 dan 2024 tidak ditarketkan karena merupakan indikator Baru tetapi memiliki capaian yang setiap tahunnya naik.

Data realisasi kinerja diatas merupakan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan menggunakan metode sampling dengan jumlah responden sebanyak 4298 responden yang terdiri dari 28 Perangkat Daerah. Pengukuran capaian kinerja indikator Nilai Indeks Pelayanan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Asahan berdasarkan pengukuran kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari keseluruhan kuisioner dapat terisi dengan baik sehingga data dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap

kuesioner yang dilaksanakan, nilai rata-rata dari masing masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Hasil Pengukuran dari Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai
1	Persyaratan Pelayanan	3,515
2	Prosedur Pelayanan	4
3	Kecepatan Pelayanan	4
4	Kewajaran Biaya Pelayanan	3
5	Produk Pelayanan	3
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	4
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	4
8	Kesesuaian Pelayanan	3
9	Tindak Lanjut Keluhan Terhadap Pelayanan	3
	Total Nilai	**31,515**

1. Persyaratan pelayanan (U1) adalah terkait dengan persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipengaruhi untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan perijinan. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian sesuai dimana persyaratan teknis dan administrasi dinilai sangat baik, mudah, transparan dan logis. Total nilai untuk ini adalah 97 dan akumulasi rata-rata 3,515.
2. Prosedur Pelayanan (U2) dimana tahapan/tata aliran/system prosedur pelayanan dinilai mudah dan sederhana. Responden memberikan penilaian mudah dengan total nilai 100 dan akumulasi rata-rata 4.
3. Kecepatan pelayanan (U3) yaitu terkait penetapan target waktu penyelesaian pelayanan yang telah ditentukan dan menjadi komitmen bersama unit pelayanan publik. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian cepat. Total nilai adalah 100 dan akumulasi rata-rata 4.

4. Kewajaran biaya pelayanan (U4) yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian gratis dimana penetapan biaya masih dianggap wajar dan tidak memberatkan dengan total nilai 75 dan akumulasi rata-rata 3.
5. Produk pelayanan (U5) rata-rata responden memberikan penilaian sesuai dengan total nilai 75 dan akumulasi rata-rata 3.
6. Kemampuan petugas pelayanan (U6) yaitu kompetensi/kemampuan petugas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Rata rata responden memberikan penilaian sangat kompeten dengan total nilai 100 dengan akumulasi rata-rata 4.
7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan (U7), adalah berkaitan dengan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur yang lebih ditekankan adalah sikap sopan dan ramah serta saling menghormati dan menghargai. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian sopan dan ramah dengan total nilai 100 dan akumulasi rata-rata 4.
8. Kualitas sarana dan prasarana (U8) Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian sangat baik dengan total nilai 75 dan akumulasi rata-rata 3.
9. Tindak lanjut keluhan terhadap pelayanan (U9) dengan penilaian berfungsi dengan baik. Diperoleh total nilai 75 dan akumulasi rata-rata 3.

Perhitungan Survey Indeks Pelayanan Kecamatan menggunakan " Nilai rata-rata Tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}111$$

Nilai Survey Unit Pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per unsur dikali 0,111. Perkalian masing-masing unsur kemudian dijumlahkan. Dari penjumlahan ini didapatkan :

1. Akumulasi nilai rata-rata tertimbang per unsur unit pelayanan adalah 31,63 : 9 unsur pelayanan = 3,515

2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setelah dikonversi dari Nilai Indeks Unit Pelayanan 3,515 dikalikan nilai dasar 25 = 87,88.

Kriteria mutu pelayanan dapat dilakukan dengan melihat Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konvensi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,25 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas maka dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan sebesar **87,88** maka mutu pelayanan sama dengan **A.** Dengan demikian maka kinerja unit pelayanan Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan adalah **Sangat Baik.**

Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk di Kabupaten Asahan, maka penilaian masyarakat ini merupakan prestasi yang cukup baik hasil kerjasama semua pihak terlebih lagi adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Asahan.

Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Kecamatan Sei Dadap secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan mellui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

3. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Mengetahui kelemahan atau kekurangan Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Asahan.
6. Mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.1.

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

Faktor Keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Keberhasilan IKM sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan pemerintah daerah dan unit pelayanan dalam menjadikan kepuasan masyarakat sebagai orientasi utama penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Ketersediaan dan penerapan standar pelayanan yang jelas, mudah dipahami, serta konsisten dilaksanakan memberikan kepastian layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Profesionalisme, keramahan, integritas, dan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan secara cepat dan tepat sangat berpengaruh terhadap persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat.
4. Penyederhanaan alur pelayanan, kejelasan persyaratan, serta kepastian waktu dan biaya pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
5. Fasilitas pelayanan yang memadai, nyaman, dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, turut mendukung peningkatan nilai IKM.

6. Sistem pengaduan yang mudah diakses serta tindak lanjut yang cepat dan tepat atas keluhan masyarakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
7. Penggunaan teknologi informasi dan pengembangan inovasi pelayanan mempermudah akses layanan, meningkatkan kecepatan proses, serta menciptakan transparansi pelayanan.
8. Pemanfaatan hasil survei IKM sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan memastikan kualitas pelayanan terus meningkat sesuai harapan masyarakat.

Langkah-Langkah Mempertahankan Keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut

1. Memastikan seluruh pimpinan dan aparatur pelayanan tetap berkomitmen menjadikan kepuasan masyarakat sebagai orientasi utama melalui penerapan budaya pelayanan prima secara konsisten.
2. Melakukan peninjauan dan pembaruan standar pelayanan secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan penguatan etika pelayanan bagi aparatur guna menjaga profesionalisme, keramahan, dan integritas dalam memberikan pelayanan.
4. Mempertahankan proses pelayanan yang sederhana, jelas, dan efisien, termasuk kepastian waktu penyelesaian dan transparansi biaya pelayanan.
5. Menjaga kualitas dan kenyamanan fasilitas pelayanan serta memastikan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
6. Mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat dan memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan.
7. Mengembangkan dan memelihara inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan transparansi.

8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil survei IKM serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

20. Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Keuangan Daerah (IKD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel. IKD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efektif serta berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengukuran IKD disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh **Kementerian Dalam Negeri**, dengan memperhatikan aspek kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, struktur belanja, serta kapasitas fiskal daerah. Indeks ini menjadi alat evaluasi penting untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil pengukuran IKD dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam mengevaluasi kebijakan fiskal, memperkuat perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, IKD tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kemandirian

fiskal, optimalisasi belanja daerah, dan penguatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.31
Capaian Indikator Kinerja Indeks Akses Keuangan Daerah

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	5	6	7	8	8	9	10	11
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,93		

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab. Asahan (2025)

Nilai capaian indikator kinerja pada pelaporan ini belum dapat disajikan, karena data realisasi masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh instansi/pihak yang berwenang. Publikasi resmi atas indikator dimaksud dijadwalkan akan dirilis pada priode berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai tindaklanjut, unit kerja telah melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala guna memastikan data dapat diperoleh tepat waktu dan akurat. Nilai capaian akan disampikan pada laporan berikutnya tau melalui mekanisme perubahan laporan kiner apabila telah tersedia.

21. Indikator Pencegahan Korupsi

Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indeks ini menggambarkan tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sejauh mana sistem dan kebijakan daerah mampu meminimalkan potensi terjadinya praktik korupsi.

Pengukuran IPK dikembangkan dan dilaksanakan dalam kerangka pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi**, dengan menitikberatkan pada aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen aparatur, serta transparansi dan pengendalian gratifikasi. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Hasil Indeks Pencegahan Korupsi menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengendalian internal, memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, IPK berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur kinerja pencegahan korupsi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Tabel 3.32
NILAI IPKD MCSP TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA

Pringkat Provinsi	Pringkat Provinsi	Pemerintah Daerah	Nilai sebelum quality Asurance	Nilai Sesudah quality Asurance	Nilai
1	91	Kabupaten Deli Sertang	91,29	91,18	89,18
2	119	Kabupaten Asahan	87,59	87,52	87,52

3	152	Kota Tanjung Balai	86,23	86,42	86,42
4	205	Kabupaten Humbang Hasundutan	82,19	82,15	82,15
5	218	Kabupaten Tapanuli Selatan	81,42	81,66	81,66
6	236	Kabupaten Toba	81,23	81,48	81,48
7	266	Kabupaten Deli Serdang	79,84	78,33	78,33
8	275	Kota medan	78,52	77,94	77,94

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (2025)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian target pencegahan korupsi pada tahun 2025 Kabupaten Asahan tingkat Nasional berada di peringkat 119 dan Tingkat provin peringkat 2 dari 33 Kabupaten.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Pencegahan Korupsi

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	5	6	7	8	8	9	10	11
	87,48		95	92,54	97,41	93	87,48	94,06

Sumber Data : Inspektorat Setdakab. Asahan (2025)

Faktor Penghambat Keberhasilan Indeks Pencegahan Korupsi

1. Lemahnya komitmen pimpinan dan aparatur dalam menerapkan prinsip integritas dan antikorupsi secara konsisten dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi.
2. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi, pedoman, dan instrumen pencegahan korupsi menyebabkan implementasi kebijakan belum optimal dan tidak seragam di seluruh perangkat daerah.

3. Pengendalian internal yang lemah, termasuk fungsi pengawasan dan manajemen risiko yang belum berjalan efektif, meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Keterbatasan dalam keterbukaan informasi, khususnya pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa, menjadi hambatan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Keterbatasan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang memahami sistem pencegahan korupsi berdampak pada rendahnya kualitas implementasi dan pengawasan kebijakan antikorupsi.
6. Masih adanya budaya kerja yang permisif terhadap praktik tidak berintegritas serta resistensi terhadap perubahan sistem dan prosedur menghambat penguatan upaya pencegahan korupsi.
7. Sistem informasi yang belum terintegrasi dan pemanfaatan teknologi yang terbatas mengurangi efektivitas transparansi, pengawasan, dan pelaporan dalam upaya pencegahan korupsi.
8. Hasil evaluasi dan rekomendasi pencegahan korupsi, termasuk yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara sistematis dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah.

Solusi untuk Keberhasilan Indeks Pencegahan Korupsi

1. Menegaskan komitmen pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah sebagai teladan integritas melalui kebijakan, pengawasan langsung, serta penerapan sanksi dan penghargaan secara adil dan konsisten.
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan terkait kebijakan dan instrumen pencegahan korupsi agar seluruh aparatur memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko, pengawasan internal, dan fungsi audit untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

4. Memperluas keterbukaan informasi publik, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa, guna meningkatkan pengawasan dan kepercayaan masyarakat.
5. Meningkatkan kompetensi aparatur dan aparat pengawas internal melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan peran pengawasan dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.
6. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung transparansi, efisiensi, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Membangun budaya kerja berintegritas melalui internalisasi nilai antikorupsi, penerapan kode etik, serta pembinaan berkelanjutan kepada seluruh aparatur.
8. Memastikan seluruh rekomendasi pencegahan korupsi, termasuk yang dikoordinasikan olehditindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah.

Gambar 3.6

Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indeks Pencegahan Korupsi 2025





Top of Form

Bottom of F

22. Indikator Indeks Desa

Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Indeks Desa merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa secara komprehensif. Indeks ini menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa sebagai dasar dalam menentukan status perkembangan desa serta arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

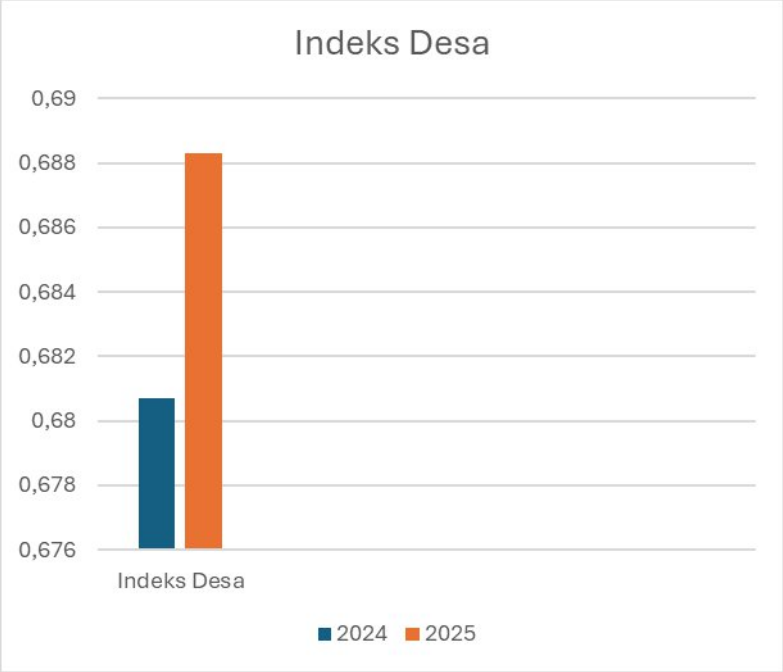
Pengukuran Indeks Desa dilakukan melalui penggabungan beberapa indikator utama yang mencerminkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi desa. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi tolok ukur dalam menilai kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengelola potensi ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Hasil pengukuran Indeks Desa digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam kategori desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, atau mandiri. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam perencanaan, pembinaan, evaluasi, serta penentuan prioritas program dan anggaran pembangunan desa.

Dengan adanya Indeks Desa, diharapkan pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih terarah, berbasis data, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian desa.

Rumus = Jumlah Nilai Indeks Desa seluruh Desa dibagi Jumlah Desa

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline (2024)	Target 2025	Realisasi	Capaian Realisasi
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa	Indeks Desa	Nilai	0,6807	0,6857	0,6883	100,38 %



Indeks Desa merupakan indikator baru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara komprehensif. Keberadaan Indeks Desa dalam RPJMD 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dasar perumusan kebijakan, penetapan prioritas program, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan desa secara terukur, objektif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara inklusif dan berkeadilan.

Analisis Keberhasilan

Nilai Indeks Desa Kabupaten Asahan sebesar 0,6883 menunjukkan capaian kinerja pembangunan desa yang berada pada kategori *berkembang*. Dan menunjukkan keberhasilan awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2025–2029. Nilai tersebut berada pada jalur

pencapaian **target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 0,7057**, sehingga mencerminkan efektivitas program penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta pendampingan desa yang berkelanjutan. Capaian ini menjadi baseline yang kuat untuk mendorong peningkatan Indeks Desa secara bertahap pada tahun-tahun selanjutnya guna mencapai target Renstra yang telah ditetapkan.. Ke depan, capaian ini perlu terus ditingkatkan melalui intervensi kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mendorong percepatan kemandirian desa serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Asahan.

Analisis Kegagalan

Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini antara lain ketimpangan tingkat perkembangan antar desa, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta belum optimalnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, pemanfaatan potensi ekonomi desa dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di beberapa desa masih memerlukan penguatan, sehingga berdampak pada nilai Indeks Desa secara keseluruhan.

Di samping itu, pendampingan desa dan sinergi lintas sektor belum sepenuhnya berjalan merata dan berkelanjutan di seluruh desa. Hal ini menyebabkan sebagian desa belum mampu memenuhi indikator Indeks Desa secara optimal. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan untuk melakukan perbaikan strategi dan percepatan program pada periode selanjutnya guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Gambar 3.7

Rangkaian Kegiatan Pencapaian Indeks Desa











Sasaran 10	:	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Peenyeelenggaraan Pelayanan Pemerintahan, Data Informasi, dan Teknologi.

Tabel 3.34
Pengukuran Capaian Sasaran 10

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Indeks Inovasi Daerah	48	54,71	113,98	Sangat Tinggi	70	78,15

2.	Indeks Pemerintahan Digital	2,88	2,86	99,30	Sangat Tinggi	3,05	93,77

23. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. Indeks ini disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bagian dari evaluasi kinerja daerah. IID mengukur seberapa aktif dan efektif suatu daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi terutama dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penilaian IID merupakan program berkesinambungan yang mendokumentasikan kreativitas pemerintahan daerah secara tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong Innovative Government Award (IGA).

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah :

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan good governance;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara 3 transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Profil Inovasi Daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi harus memenuhi kriteria dan persyaratan antara lain :

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;

3. Tidak mengabikatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah;
5. Dapat direplikasi

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan melalui perhitungan skor berdasarkan variabel yang terdiri dari 36 indikator yang terbagi dalam 2 (dua) kategori utama yaitu Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID). Satuan Pemerintahan Daerah untuk menilai dampak inovasi terhadap capaian daerah, seperti peningkatan PAD, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan investasi, dan nilai IPM. Sedangkan Satuan Inovasi Daerah mengukur dokumen inovasi, regulasi, ketersediaan SDM, dukungan anggaran, dan kualitas inovasi (kebaruan, tahapan, inisiator, bentuk, tujuan).
Berikut skor dan kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 :

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	65,01 - 100,00
Inovatif	40,01 – 65,00
Kurang Inovatif	0,01 – 40,00
Tidak Dapat Dinilai	0

Rumus Perhitungan Indeks Inovasi Daerah :

$$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ X\ 100$$

Tabel 3.35

Adapun Capaian Kinerja Indikator Indeks Inovasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terlihat dari tabel berikut :

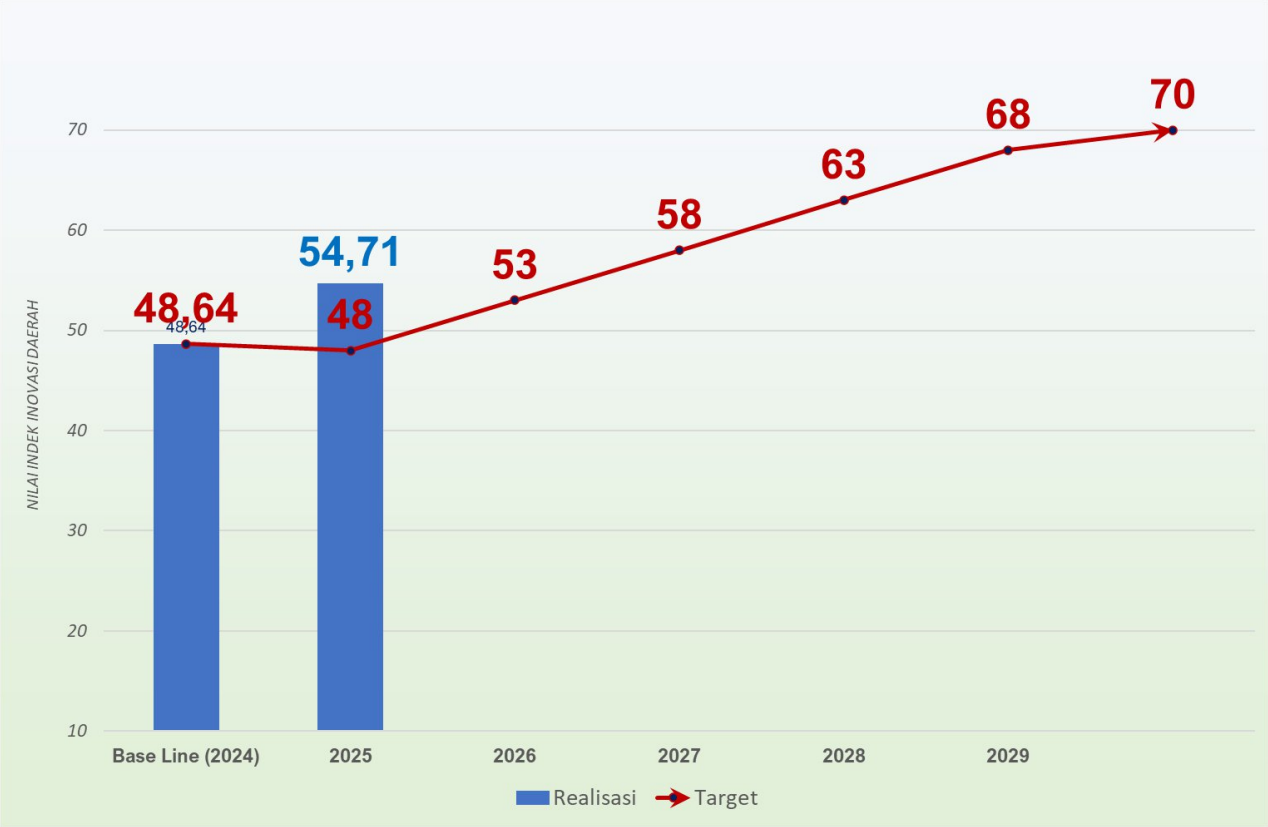
Tabel 3.35

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	5	6	7	8	8	9	10	11
				48,64		48	54,71	113,98%

Sumber Data : Bapperida Kab. Asahan (2025)

Dari table diatas dapat dijelaskan indikator tidak ditetapkan targetnya pada 2023 dan 2024, tidak dapat diukur secara kuantitatif terhadap target yang telah direncanakan. kondisi aktual indikator pada tahun 2025 atau tahun berjalan dengan capaian 113,98% dibandingkan tahun sebelumnya capaian meningkat

Grafik Target dan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Asahan



Analisis Keberhasilan

Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2025 sebesar 54,71 menunjukkan Kabupaten Asahan berada pada kategori kabupaten yang "Inovatif". Dari target nilai tahun 2025 sebesar 48 telah dapat dilampaui berdasarkan perolehan nilai pada angka 54,71 sehingga capaian realisasi telah mencapai sebesar 113,98%. Perolehan nilai ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovoasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025. Capaian ini menjadi baseline yang kuat untuk mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah secara bertahap untuk tahun berikutnya. Capaian ini juga merupakan dampak langsung dari kebijakan kepala daerah yang mendorong setiap organisasi Perangat Daerah untuk menciptkan inovasi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025 terdapat 35 inovasi yang aktif di Kabupaten Asahan dan berada dalam tahap penerapan. Keseluruhan inovasi tersebut telah di kirimkan dan di ikutsertakan dalam Innovative Government Award (IGA) yang merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah. Inovasi tersebut terdiri dari 15 inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, 6 inovasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan 14 inovasi yang berhubungan dengan kategori inovasi lainnya.

Untuk peningkatan inovasi daerah ini berbagai upaya terus dilakukan antara lain dengan peningkatan inovasi dalam pelayanan masyarakat, mendorong perangkat daerah untuk menyampaikan inovasinya, memberikan asistensi penyusunan kelengkapan dokumen inovasi melalui klinik inovasi serta melakukan berbagai pertemuan rutin secara berkala.

Ke depan, capaian ini perlu terus ditingkatkan melalui intervensi kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mendorong percepatan kemandirian desa serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Asahan.

Tabel 3.36

Skor dan Status Kinerja Indeks Inovasi Daerah terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovoasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025

NO	INSTANSI	INDEKS	KATEGORI
1	Kabupaten Deli Serdang	64,02	Inovatif
2	Kabupaten Karo	60,36	Inovatif
3	Kota Binjai	58,16	Inovatif
4	Kota Medan	58,16	Inovatif
5	Kabupaten Batu Bara	57,84	Inovatif
6	Kabupaten Humbanghasundutan	56,43	Inovatif
7	Kabupaten Asahan	54,71	Inovatif
8	Kabupaten Serdang Bedagai	49,36	Inovatif
9	Kabupaten Padang Lawas Utara	49,26	Inovatif
10	Kota Padang Sidempuan	44,29	Inovatif
11	Kabupaten Dairi	49,19	Inovatif
12	Kabupaten Nias	48,72	Inovatif
13	Kabupaten Langkat	47,81	Inovatif
14	Kabupaten Nias utara	47,74	Inovatif
15	Kabupaten Tapanuli Selatan	47,46	Inovatif
16	Kota Pematang Siantar	46,00	Inovatif
17	Kabupaten Mandailing Natal	45,64	Inovatif
18	Kabupaten Tapanuli Utara	45,43	Inovatif

19	Kabupaten Nias Selatan	44,22	Inovatif
20	Kabupaten Labuhan Batu	44,14	Inovatif
21	Kota Tanjung Balai	42,70	Inovatif
22	Kabupaten Labuhan Batu Utara	41,27	Inovatif
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	40,88	Inovatif
24	Kota Sibolga	40,78	Inovatif
25	Kabupaten Toba	39,12	Kurang Inovatif
26	Kabupaten Samosir	36,70	Kurang Inovatif
27	Kabupaten Simalungun	35,54	Kurang Inovatif
28	Kabupaten Nias Barat	24,28	Kurang Inovatif
29	Kota Tebing Tinggi	23,52	Kurang Inovatif
30	Kabupaten Padang Lawas	7,30	Kurang Inovatif
31	Kota Gunungsitoli	N/A	N/A
32	Kabupaten Latuhan Batu Selatan	N/A	N/A
33	Kabupaten Pakpak Bharat	N/A	N/A

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab. Asahan (2025)

24. Indikator Indeks Pemerintahan Digital

Indeks Pemerintahan Digital merupakan instrumen strategis untuk mengukur tingkat kematangan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, pengukuran ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mendorong implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Indeks ini tidak hanya menilai ketersediaan infrastruktur digital, tetapi juga mengukur tata kelola, manajemen layanan, integrasi sistem, keamanan informasi, serta kualitas pelayanan publik berbasis digital. Melalui indeks ini, pemerintah dapat mengetahui posisi dan tingkat kematangan transformasi digital yang telah dicapai, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Secara umum, dimensi penilaian Indeks Pemerintahan Digital meliputi:

1. **Kebijakan dan Tata Kelola Digital** – Keberadaan regulasi, arsitektur SPBE, dan perencanaan strategis transformasi digital.
2. **Manajemen dan Integrasi Sistem** – Interoperabilitas aplikasi, penggunaan data terintegrasi, dan efisiensi proses bisnis.
3. **Layanan Publik Digital** – Ketersediaan layanan daring yang mudah diakses, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. **Keamanan Informasi dan Infrastruktur** – Perlindungan data, keandalan jaringan, serta sistem pengamanan siber.

Peningkatan Indeks Pemerintahan Digital mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital juga mendukung percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan, Indeks Pemerintahan Digital menjadi pendorong utama terciptanya pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan prima di era digital.

Gambar 3.8
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indeks Pemerintahan Digital 2025





Kemudian untuk capaian Misi 5 dapat dilihat dari Tabel berikut:

MISI 5	**:**	**Menyelenggarakan Pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan Lingkungan**
Sasaran	:	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Air, Udara dan Lahan

Sasaran 11	:	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Air, Udara dan Lahan

Pencapaian sasaran tersebut diatas diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.37
Pengukuran Capaian Sasaran 11

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025
1.	Penurunan Emisi GRK (GgCO2-e)	144.122,13	24780	17,19	Sangat Rendah	276.435,78	8,96

25. Penurunan Emisi GRK (GgCo2-e)

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah upaya global untuk mengurangi pemanasan global melalui transisi energy terbarukan, efisiensi energy, reforestasi dan perubahan perilaku, dengan target signifikan dari pemerintah

indonesia di berbagai sector seperti energy, kehutanan dan limbah untuk mencapai emisi nol bersih *(net zero emission).* Langkah kongkret termasuk penggunaan kendaraan listrik/umum, hemat energy, tanam pohon, pengolahan limbah, serta inovasi teknologi dan pasar karbon.

Tujuan utama penurunan emisi gas rumah kaca adalah untuk mengerem laju pemanasan global agar bumi tidak semakin panas dan tetap layak huni bagi generasi mendatang. Secara ilmiah, gas-gas seperti karbon dioksida (CO2) bertindak seperti "selimut" yang memerangkap panas matahari di atmosfer; jika jumlahnya terlalu banyak, suhu bumi akan melonjak drastis. Dengan menurunkan emisi, kita bertujuan menstabilkan iklim agar cuaca tidak menjadi ekstrem, mencegah es di kutub mencair yang bisa menenggelamkan pesisir, serta menjaga ketersediaan pangan dan air bersih yang terancam oleh perubahan musim yang tidak menentu. Singkatnya, ini adalah upaya penyelamatan ekosistem dan keselamatan manusia dari risiko bencana alam yang lebih besar di masa depan.

Berdasarkan dokumen kebijakan *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)* Indonesia, komponen penurunan emisi disusun berdasarkan lima sektor kritikal:

- **Sektor Energi & Transportasi:** Fokus pada transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan serta elektrifikasi kendaraan untuk menekan emisi CO2.
- **Sektor FOLU (Kehutanan dan Lahan):** Menjadi komponen penyerap karbon utama melalui pencegahan deforestasi dan restorasi lahan gambut.
- **Sektor Pertanian:** Mengatur pengelolaan pupuk dan limbah ternak guna mengurangi gas metana (CH4) dan dinitrogen oksida (N2O).
- **Sektor Limbah:** Mengimplementasikan strategi **3R (Reduce, Reuse, Recycle)** dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah pelepasan gas metana dari tempat pembuangan akhir.
- **Sektor IPPU (Proses Industri):** Mengurangi emisi dari penggunaan produk kimia dan proses manufaktur melalui teknologi industri hijau.

Rumus Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:

Keterangan:
Emisi Baseline = Jumlah Emisi yang terjadi tanpa intervensi

Emisi Aktual Mitigasi = Jumlah emisi setelah uapaya pengurangan

Nilai penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) diperoleh dari selisih antara tingkat emisi pada scenario tanpa aksi mitigasi *(baseline)* dengan tingkat emisi actual yang terjadi setelah adanya intervensi. Nilai ini muncul dari hasil kalkulasi dua variable utama yakni Besaran volume kegiatan manusia seperti jumlah liter bahan bakar yang dibakar, megawatt-hour listrik yang dikonsumsi atau luasan hutan yang direhabilitasi dan faktor emisi yaitu koefisien yang menunjukkan jumlah emisi GRK per unit aktivitas.

Adapun Capaian Kinerja Indikator Penurunan Emisi GRK (GgCO2-e) pada Pemerintah Kabupaten Asahan sejak Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terlihat dari tabel berikut:

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Penurunan Emisi GRK (GgCO2-e)

2023			2024			2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**
4	**5**	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**	**10**	**11**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	144.122,13	24780	17,19

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Asahan (2025)

Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator sasaran Bupati yang menjadi tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2025 targetnya sebesar 144122,13 Ton CO2 eq dan realisasi yang dicapai sebesar 24780 Ton CO2 eq Dalam rangka mencapai tujuan Bupati tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Pengolahan sampah dan limbah, Perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengendalian Pencemaran dan ketaatan usaha, Pengambilan sampel dan pemantauan kualitas lingkungan, Pengendalian emisi sumber bergerak, Edukasi, penyuluhan lingkungan dan peningkatan peran masyarakat, Inventarisasi dan pelaporan emisi GRK, Penyusunan kebijakan dan perencanaan lingkungan . Semua Kegiatan tersebut di jalankan melalui Program-program dan kebijakan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

Beberapa faktor yang membuat capaian penurunan emisi belum optimal adalah:

- Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil: Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik. Kapasitas Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang besar menyebabkan emisi sektor ketenagalistrikan terus tumbuh rata-rata 8% per tahun.

- Hambatan Transisi Energi Terbarukan: Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terhambat oleh biaya investasi awal yang tinggi, infrastruktur transmisi yang belum merata, serta regulasi yang terkadang dianggap belum konsisten.
- Deforestasi dan Penggunaan Lahan: Perubahan penggunaan lahan akibat kebijakan penggundulan hutan, aktivitas pertambangan, dan fluktuasi kebakaran hutan tahunan tetap menjadi penyumbang emisi karbon yang signifikan.
- Pasar Karbon yang Belum Optimal: Ekosistem Pasar Karbon Indonesia dinilai masih lesu dan belum mampu memberikan insentif finansial yang cukup kuat bagi industri untuk melakukan mitigasi secara masif.

Upaya meningkatkan nilai penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke sumber bersih seperti tenaga surya dan angin, serta meningkatkan efisiensi energi di sektor industri dan rumah tangga. Di sisi lingkungan, langkah kunci melibatkan perlindungan hutan dan restorasi lahan gambut yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami, serta penerapan teknologi penangkapan emisi (CCS) pada pabrik-pabrik besar. Selain itu, pengelolaan sampah yang lebih baik dan penggunaan transportasi ramah lingkungan sangat penting untuk menekan pelepasan gas metana dan karbon secara masif. Melalui kombinasi teknologi hijau, aturan hukum yang tegas, dan perubahan gaya hidup hemat energi, jumlah emisi yang dibuang ke atmosfer dapat dikurangi secara signifikan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil.

Keberhasilan atau kegagalan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sangat bergantung pada kolaborasi antara kebijakan pemerintah, kesiapan teknologi, dan peran masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor penentunya:

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Komitmen Regulasi yang Kuat : Adanya payung hukum yang tegas seperti Perpres No.14 Tahun 2024 tentang penangkapan karbon memberikan kepastian bagi industri untuk bergerak menuju rendah emisi.
- Transisi ke Energi Terbarukan: Kemudahan akses dan investasi pada energi bersih (seperti panel surya, angin, dan panas bumi) menggantikan ketergantungan pada batu bara.
- Inovasi Teknologi: Adopsi teknologi baru seperti kendaraan listrik dan sistem pemantauan emisi berbasis data digital yang akurat.
- Kesadaran Masyarakat: Perubahan gaya hidup masyarakat ke arah konsumsi energi yang hemat dan pengurangan sampah plastik/makanan.

Faktor Penghambat (Penyebab Kegagalan):

- Tingginya Biaya Investasi: Teknologi ramah lingkungan seringkali memerlukan biaya awal yang sangat mahal dibandingkan teknologi konvensional.
- Ketergantungan pada Fosil: Infrastruktur energi yang sudah ada (seperti PLTU) masih dominan, sehingga sulit untuk dialihkan secara cepat tanpa kerugian ekonomi besar.
- Penegakan Hukum yang Lemah: Kurangnya pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar batas emisi atau melakukan penggundulan hutan secara ilegal.
- Data yang Tidak Transparan: Kesulitan dalam menghitung emisi secara akurat di lapangan yang menghambat evaluasi kebijakan mitigasi.

Gambar 3.9
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Koordinasi dan permintaan data inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) ke PT. Agro Serasi Lestari</td><td>Koordinasi dan permintaan data inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) ke SPBU 14.212.229 Pulo Bandring</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Koordinasi dan permintaan data inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) ke kantor Kec. Meranti</td><td>Koordinasi dan permintaan data inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) ke SPBU 14.213.233 Kec. Teluk Dalam</td></tr>
</table>

Sasaran 12	:	Meningkatnya Ketanggunan terhadap bencana

Tabel 3.39
Pengukuran Capaian Sasaran 12

No	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir	Capaian s/d

						RPJMD	2025
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,37	0,36	97,29	Sangat Tinggi	0,47	76,59

26. Indikator Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 3.40
Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah

2023			2024			2025		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
4	5	6	7	8	8	9	10	11
				0,35		0,37	0,36	97,30

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Kab. Asahan (2025)

Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memiliki target skor sebesar 0,37 dengan realisasi 0,36, sehingga capaian kinerjanya adalah 97,30%. Meskipun belum mencapai target secara penuh, capaian ini tetap dikategorikan Sangat Tinggi, menunjukkan bahwa ketahanan daerah Kabupaten Asahan terhadap bencana berada pada kondisi yang baik dan stabil. Sumber data indikator ini berasal dari BNPB.

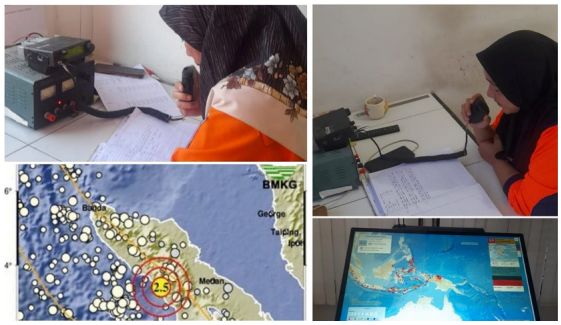
Pada indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 0,36 dari target akhir tahun 2030 sebesar 0,47 sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 76,60%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana telah berjalan dengan baik dan berada pada jalur yang sesuai dengan target jangka panjang yang ditetapkan.

Gambar 3.10
Rangkaian Kegiatan Pencapaian Target Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025











1. Realisasi Anggaran

Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan di tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam memenuhi target masing-masing sasaran dapat tercapai berkat dukungan pengalokasian anggaran yang baik. Dukungan pagu anggaran secara keseluruhan (Belanja Daerah) Rp.

2.043.565.707.338,3 dan Realisasi Belanja Daerah Rp. 1.925.542.833.865,71, dengan persentase serapan anggaran sebesar 94,22%.

untuk mendukung 12 Sasaran Strategis pada tahun 2025 sebesar Rp. 181.645.487.310,00. Pada akhir tahun 2025, anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp. 172.431.926.125,00 dengan persentase serapan anggaran sebesar 94,93%

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya didasarkan pada persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program-program daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan serapan anggaran tiap indikator atau program. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien apabila perbandingan tersebut sama dengan atau lebih besar 100%, dan tidak efisien jika kurang dari 100%. Efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran/indikator kinerja diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.41

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Pencapaian Kinerja	Program	Pagu (Rupiah) A	Realisasi (Rupiah) A	Serapan (A/B) x 100%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Intelektualitas dan karekter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	100,94%	Program Pengelolaan Pendidikan	750.000.000	684.000.000	91,2	9,74
		Rata-rata lama sekolah	101,68%	Program Pengelolaan Pendidikan	1.442.000.000	1.404.444.000	97,39	4,28
2	Meningkatnya Penguatan Budaya, Bahasa, Literasi, Pendidikan Karekter Pemuda dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembanguann Kebudayaan	96,14 %	Program Pengembangan Kebudayaan	6.264.000.000	6.262.625.000	99,98	-3,84
		Indeks Pembangunan Literasi	15,47%	Program Pembinaan	1.696.306.038	1.645.724.950	97,01	-81,55

		Masyarakat (IPLM)		Perpustakaan				
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	-	-	-	-	-
		Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) Pertanian	100,04%	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	94.911.023.604	91.689.528.577	96,60	3,43
				program peningkata	2.107.189.000	1.690.779.000	80,23	19,80

				n kapasitas sumber daya manusia kesehatan				
				program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	366.746.000	365.365.934	99,63	0,42
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.233.986.000	2.233.377.060	99,97	0,07
4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Pembangunan Perempuan	Indeks Pembangunan Berwawasan	88.43%	Program Pengendalian Penduduk	139.999.400	139.999.400	100	-11,57

	serta Pemenuhan Hak Anak	Kependudukan (IPBK)						
		Indeks Pembangunan Gender	101%	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60.000.000	59.999.800	99,99	1,00
		Rasio Kekerasan Anak (Per 10.000)	28,40%	Program Perlindungan Khusus Anak	443.912.500	436.731.500	98.38	-69,98
5	Meningkatnya Daya Dukung Ekosistem Berusaha, Pengelolaaan Sumber Daya dan Hilirisasi Sektor	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)						

6	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	100%	Program Pemberdayaan Sosial	7.410.396.000	5.650.664.100	76,25	23,75
				Program Rehabilitasi Sosial	774.881.950	715.932.000	92.39	7,61
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	757.500.650	733.570.467	96,84	3,16
				Program Penangan Bencana	485.329.705	408.878.345	84,24	15,75
		Tingkat Pengangguran terbuka		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	324.999.950	324.850.940	99,95	

				Program Penempatan Tenaga Kerja	77.075.300	75.954.700	98,52	
7	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Derah menuju swasembada pangan	Indeks Ketahanan Pangan	100,94%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian pangan	650.000.000	647.962.333	99,68	1,25
				Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan	2.896.610.325	2.836.430.911	97,92	3,02

				Pangan Masyarakat				
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	351.780.000	329.451.650	93,65	7.29
				program pengawasan keamanan pangan	1.403.255.050	1.370.664.436	97,68	3.26
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	101,06%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.787.500.000	1.774.691.150	99,28	1,78
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.050.000.000	3.300.532.500	99,68	1,49

				program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.135.283.943	2.065.872.661.50	96,75	4,31
				Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	9.624.678.827	9.544.432.029	99,17	1,89
				program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	752.129.140	746.726.390	99,28	1,78
				program perizinan usaha	154.999.390	154.659.090	99,78	1,28

				pertanian				
8.	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Ideks Infrastruktur	109,79	program penyuluhan pertanian	1.133.807.100	1.067.843.550	94,18	10.77
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.021.511.985	5.717.831.633	94,95	14,83
9.	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama, Demokrasi, Toleransi, dan Kegotongroyongan di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78.30%	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	18.203.750	18.113.750		-21,21
				Program pemberdayaan ormas dan pengawasan ormas	1.950.000.000	1.950.000.000	100	-21,70

		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	105,05%	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	2.017.044.350	1.999.258.895	99,11	5,93
				Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	2.172.482.155	2.057.187.739	94.69	10,36
10.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa.	Indeks Pelayanan Publik	131.69	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	170.445.650	153.546.650	90.08	25.89
		Indek Kepuasan Masyarakat	100,27					
		Indeks Keuanga			216.957.250	216.725.270	99,89	

		n Daerah						
		Indeks Pemberantasan Korupsi		Penyelenggaraan Pengawasan	1.350.600.000	1.337.600.000	99,03	-4,98
		Indeks Desa	100,38%	Program Penataan Desa	42.450.250	42.147.850	99,28	1,09
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	9.200.000	9.200.000	100	0,38
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	12.500.300	11.500.300	92	8,38
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga	7.637.629.163	7.087.813.331	92,28	7,58

				Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
11	Meningkatnya Kwalitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan, dan teknologi Melek Teknologi	Indeks Inovasi Daerah	113,98%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	519.560.375	448.557.575	86,33	27,65
		Indeks Pemerintahan Digital	99,31%	Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.424.300.211,73	5.324.887.116	98,16	1,14
12	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas air, udara dan lahan	Penurunan Emisi GRK (CO2 Eq)	17,19%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan	331.389.400	326.111.780	98,40	-81,22

				Pogram Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	4.873.124.527	4.645.427.495	95,32	-78,14
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	72.899.709	71.946.925	98,69	-81,50
				Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan	528.988.096	528.359.533	99,88	-82,59

				Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat				
				Program Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	1.797.413.726	1.742.990.157	96,97	-79,78
13	Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	97,30%	Penanggulangan Bencana	2.293.396.540	2.198.004.074	95,84	1,46

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Govermen)Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024. Pembuatan LKJ ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagai harapan semua pihak.

Dalam Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 12 tujuan, 15 sasaran dengan 28 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan terdiri dari 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 88,04 % (Tinggi)
- Sasaran terdiri dari 12 Sasaran dan 26 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 88,04% (Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 12 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pencapaian target indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan juga di dukung dengan adanya alokasi anggaran dalam perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp. 2.043.565.707.338,3 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.925.542.833.865,71 dengan persentase serapan anggaran sebesar 94,22%.

untuk mendukung 12 Sasaran Strategis pada tahun 2025 sebesar Rp. 181.645.487.310,00. Pada akhir tahun 2025, anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp. 172.431.926.125,00 dengan persentase serapan anggaran sebesar 94,93%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan.

Kisaran,

Bupati Asahan

Taufik Zainal Abidin